



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Tugas dan fungsi tersebut telah dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang pembiayaannya dialokasikan dalam dokumen DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018. Laporan ini menyajikan pencapaian dari indikator keluaran dari berbagai kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki selama tahun 2018.

Kami harapkan laporan ini dapat memberikan informasi kepada unit utama kami Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, dan pihak-pihak terkait tentang kegiatan pada tahun 2018.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam pelaksanaan kegiatannya selama tahun 2018. Saran membangun kami harapkan, untuk mengatasi tantangan yang ditemukan demi peningkatan pencapaian kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun mendatang.

Tangerang, Januari 2019
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta



dr. Anas Ma'ruf, MKM
NIP 197005202002121003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban kinerja KKP Kelas I Soekarno Hatta dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi. Sebagai salah satu UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka orientasi kerjanya adalah mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Program P2P sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2018-2019.

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki sasaran strategis yaitu meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta meningkatnya kesehatan jiwa pada akhir tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka KKP Kelas I Soekarno-Hatta menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk Negara. Untuk mencapai sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pengendalian Kekejarantinaan, Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Ketatausahaan.

Untuk menilai keberhasilan KKP Kelas I Soekarno Hatta, telah ditetapkan 14 indikator. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 95,46%, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 132,8%. Dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat dipaparkan bahwa :

- a. Terdapat 7 indikator yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu:
 - 1) Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekejarantinaan kesehatan dengan realisasi 729 sertifikat dan capaian 121,5 %
 - 2) Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan realisasi 42.579 sertifikat dan capaian 110 %
 - 3) Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus dengan realisasi 13 layanan dan capaian 162,5 %
 - 4) Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan realisasi 156.351 sertifikat dan capaian 156,4 %



- 5) Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dengan realisasi 1.256 orang dan capaian 129,6 %
 - 6) Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu dengan realisasi 3 lokasi dan capaian 300 %
 - 7) Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP dengan realisasi 9 lokasi dan capaian 180 %
- b. Terdapat 7 indikator yang capaiannya 100%, yaitu:
- 1) Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP dengan realisasi 100% dan capaian 100 %
 - 2) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah dengan realisasi 1 bandara dan capaian 100 %
 - 3) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan realisasi 2 bandara dan capaian 100 %
 - 4) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dengan realisasi 2 bandara dan capaian 100 %
 - 5) Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan realisasi 40 dokumen dan capaian 100 %
 - 6) Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dengan realisasi 12 kali pelatihan dan capaian 100 %
 - 7) Jumlah pengadaan sarana prasarana dengan realisasi 2 paket pengadaan dan capaian 100 %

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja di tahun 2018 yaitu tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, optimalisasi sumber daya manusia yang ada, peningkatan kerjasama tim dan koordinasi dengan lintas sektor.

Kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja selama tahun 2018 yaitu jumlah SDM yang belum sebanding dengan beban kerja jumlah orang, alat angkut, barang, dan tempat yang harus dilakukan pengawasan, alokasi anggaran pada beberapa kegiatan dengan cakupan yang banyak belum memadai, kontribusi lintas sektor / lintas program yang berhubungan dengan kegiatan KKP Kelas I Soekarno-Hatta masih ada yang belum baik.



Pemecahan masalah pada tahun yang akan datang adalah usulan penambahan SDM terampil di bidangnya, pengalokasian anggaran berdasarkan Petunjuk Perencanaan dan skala prioritas, monitoring dan evaluasi pencapaian kegiatan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik melalui advokasi, sosialisasi kegiatan dan membangun komitmen secara bersama-sama untuk mencegah keluar masuknya penyakit melalui pintu gerbang Negara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya Manusia	5
F. Maksud dan Tujuan	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Perencanaan Kinerja	10
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Analisis Pencapaian Kinerja	19
1. Indikator jumlah Alat Angkut Sesuai Dengan Standar Kekeparantaraan Kesehatan	19
2. Indikator persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	25
3. Indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	30
4. Indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	35
5. Indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	40
6. Indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan ..	44



7. Indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	49
8. Indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	58
9. Indikator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	65
10. Indikator jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu	69
11. Indikator jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	72
12. Indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	75
13. Indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	79
14. Indikator umlah pengadaan sarana prasarana	83
C. Sumber Daya	79
BAB IV KESIMPULAN	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja RAK Tahun 2015-2019 KKP Kelas I Soekarno-Hatta Sebelum Perubahan	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja RAK Tahun 2018-2019 KKP Kelas I Soekarno-Hatta Setelah Perubahan	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018	15
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2018 KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018	18
Tabel 3.2	Realisasi Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus Tahun 2018	35
Tabel 3.3	Hasil Inspeksi Sanitasi Tahun 2018	50
Tabel 3.4	Hasil Pemantauan Vektor Tahun 2018	58
Tabel 3.5	Hasil Skrining Penyakit Menular Langsung Tahun 2018	66
Tabel 3.6	Hasil Pelaksanaan Posbindu Tahun 2018	70
Tabel 3.7	Efisiensi Pengadaan Tahun 2018	85
Tabel 3.8	Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengeluaran Menurut Jenis Belanja KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2018	86
Tabel 3.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018	87
Tabel 3.10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018	87
Tabel 3.11	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018	88
Tabel 3.12	Posisi Barang Milik Negara di KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2018	90
Tabel 3.13	Posisi Barang Persediaan di KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2018	90
Tabel 3.14	Rincian Aset Sarana dan Prasarana KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2018	91



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018	5
Grafik 1.2	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Golongan Tahun 2018	5
Grafik 1.3	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Tahun 2018	6
Grafik 1.4	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018	6
Grafik 1.5	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2018	7
Grafik 1.6	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2018	7
Grafik 1.7	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Tempat Penempatan Tahun 2018	8
Grafik 1.8	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Penempatan Dinas Tahun 2018	8
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekeparantaraan	20
Grafik 3.2	Perbandingan Jumlah Penerbitan Sertifikat Knock Down (KD).....	21
Grafik 3.3	Perbandingan Jumlah Inspeksi Sanitasi dan Penerbitan Sertifikat Sanitasi pesawat	21
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Respon Sinyal SKD KLB dan Bencana di Wilayah KKP.....	27
Grafik 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Deteksi Dini Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit.....	31
Grafik 3.6	Perbandingan Jumlah Pengawasan Dokumen Gendec	32
Grafik 3.7	Perbandingan Jumlah Surveilans Rutin	32
Grafik 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	36
Grafik 3.9	Perbandingan Jumlah Kunjungan Pos Kesehatan Pada Situasi Khusus	36



Grafik 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandar Udara/PLBD yang Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah	41
Grafik 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang Diterbitkan	45
Grafik 3.12	Perbandingan Jumlah Penerbitan ICV dan Legalisasi ICV	45
Grafik 3.13	Perbandingan Jumlah Surat Ijin Layanan Kesehatan	46
Grafik 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi	51
Grafik 3.15	Perbandingan Jumlah TTU, TPM, dan Sarana Penyediaan Air Bersih yang Memenuhi Syarat	52
Grafik 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area	59
Grafik 3.17	Data Pengamatan Vektor di Bandara Soekarno Hatta.....	59
Grafik 3.18	Data Pengamatan Vektor di Bandara Halim Perdanakusuma.....	60
Grafik 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Orang yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung	65
Grafik 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Wilayah Kerja yang Melaksanakan Posbindu	69
Grafik 3.21	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Tempat Kerja yang Melaksanakan Implementasi KTR Di Wilayah Kerja KKP.....	73
Grafik 3.22	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	76
Grafik 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P	80
Grafik 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana	83
Grafik 3.24	Realisasi Anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018	4
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi serta semakin cepatnya dan singkatnya perjalanan lintas dunia untuk perdagangan, wisata, bisnis, dan transportasi barang maka permasalahan kesehatan lokal dapat menjadi perhatian dan masalah dunia.

International Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan, memperkuat dan mempertahankan kapasitas kesehatan masyarakat nasional, agar dapat mendeteksi, menilai, melaporkan berbagai peristiwa dan merespon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai risiko dan emergensi kesehatan masyarakat. Selain itu setiap negara mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menangkal transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan serta meresahkan dunia (PHEIC). Negara-negara anggota juga harus melakukan penyesuaian legal dan administrasi untuk memfasilitasi kepatutan terhadap IHR 2005.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno-Hatta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Tugas KKP Kelas I Soekarno-Hatta adalah mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Bandara Soekarno Hatta merupakan bandara internasional terbesar dan terpadat penerbangannya di Indonesia sedangkan Bandara Halim Perdanakusumamerupakan bandara khusus untuk kegiatan protokoler kenegaraan dan berbagai *carter flight* dan pada tahun 2017 mulai digunakan untuk penerbangan komersial. Sehingga keberhasilan KKP Kelas I Soekarno- Hatta dalam melaksanakan tugasnya menjadi sangat penting dalam menjaga kewibawaan Bangsa dan Negara Indonesia.



B. ISU STRATEGIS

Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat membuat jarak antar negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global.

Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma merupakan bandara yang memiliki aktivitas tinggi akan pergerakan alat angkut, muatan maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat.

Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (re-emerging diseases). Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas KKP Kelas I Soekarno-Hatta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/IV/2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. Dalam rangka

pelaksanaan tugas tersebut, KKP Kelas I Soekarno-Hatta melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kekarantinaan.
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas.
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia.
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional.
7. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
8. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja dilingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pemberian sertifikasi kesehatan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
11. Pelaksanaan pemberian layanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan.
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas negara.
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga KKP.



Enam belas fungsi diatas terdapat dalam indikator kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta yang telah ditetapkan dalam rangka pengendalian berbagai risiko kesehatan yang berada di Pintu Masuk Negara untuk upaya cegah tangkal penyakit agar jumlah penyakit menular, penyakit tidak menular menurun dan kesehatan jiwa meningkat sesuai sasaran Ditjen P2P. Sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat meningkat.

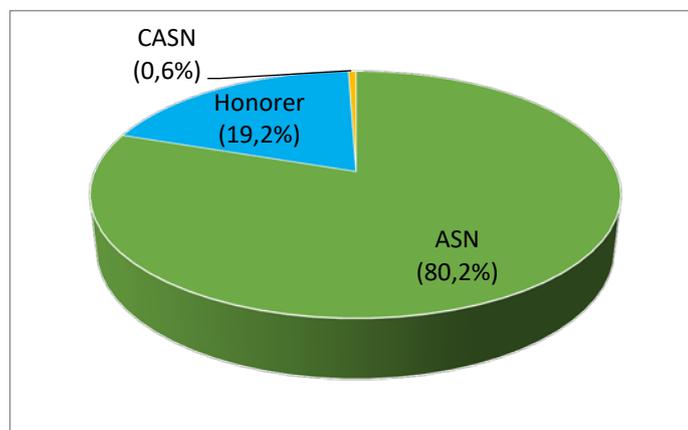
D. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KKP Kelas I Soekarno-Hatta



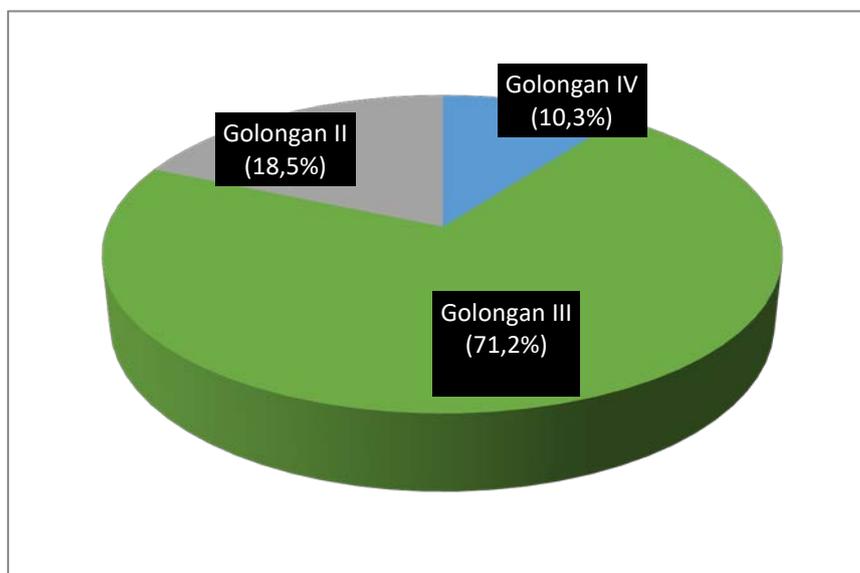
E. SUMBER DAYA MANUSIA

Grafik 1.1
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018



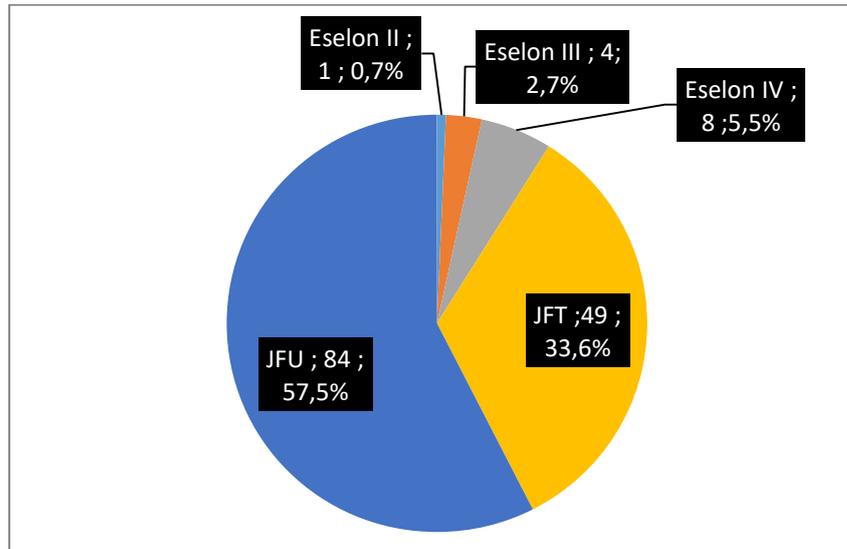
Jumlah pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 sebanyak 182 orang. Dari grafik 1.1 diketahui bahwa 80,2% atau 146 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), 0,6% atau 1 orang berstatus Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan 19,2% atau 35 orang berstatus honorer.

Grafik 1.2
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Golongan Tahun 2018



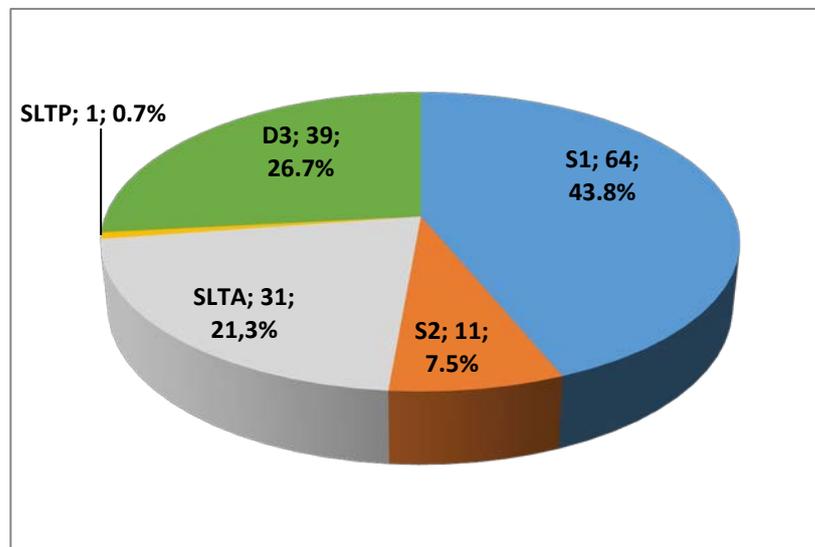
Berdasarkan grafik 1.2 diketahui bahwa dari 146 orang Aparatur Sipil Negara dan 1 orang Calon Aparatur Sipil Negara, sebagian besar pegawai 104 orang (71.2%) memiliki golongan pangkat III, 27 orang (18.5 %) memiliki golongan pangkat II dan 15 orang (10.3%) memiliki golongan pangkat IV.

Grafik 1.3
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Tahun 2018



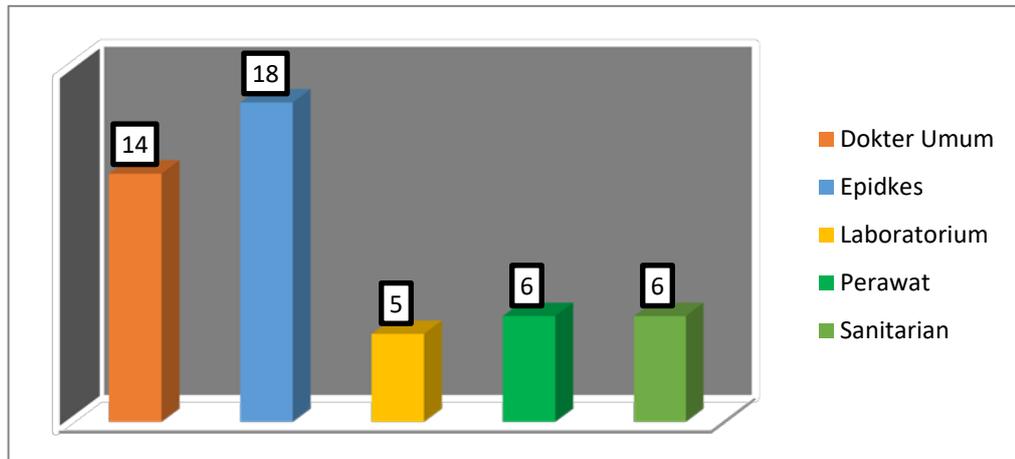
Dari grafik 1.3 diketahui distribusi pegawai berdasarkan jabatan yang diduduki yaitu Jabatan Struktural sebanyak 13 orang, Jabatan fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 49 orang, dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 84 orang.

Grafik 1.4
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018



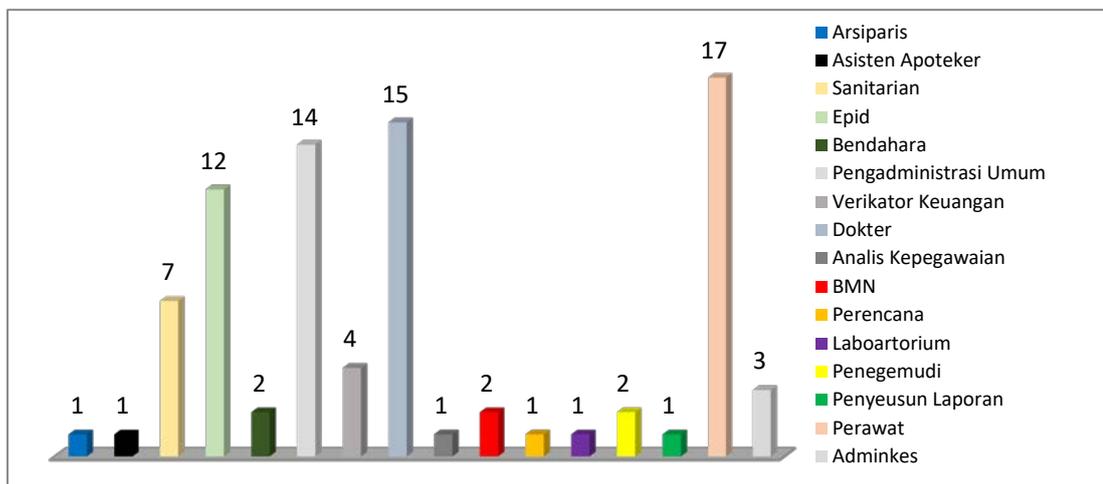
Berdasarkan grafik 1.4 terlihat bahwa 64 orang (43.8%) berpendidikan S1, 39 orang (26,7%) berpendidikan Diploma III, 31 orang (21.3%) berpendidikan SMA, 11 (7,5%) orang berpendidikan S2, dan 1 orang (0,7%) berpendidikan orang SLTP.

Grafik 1.5
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2018



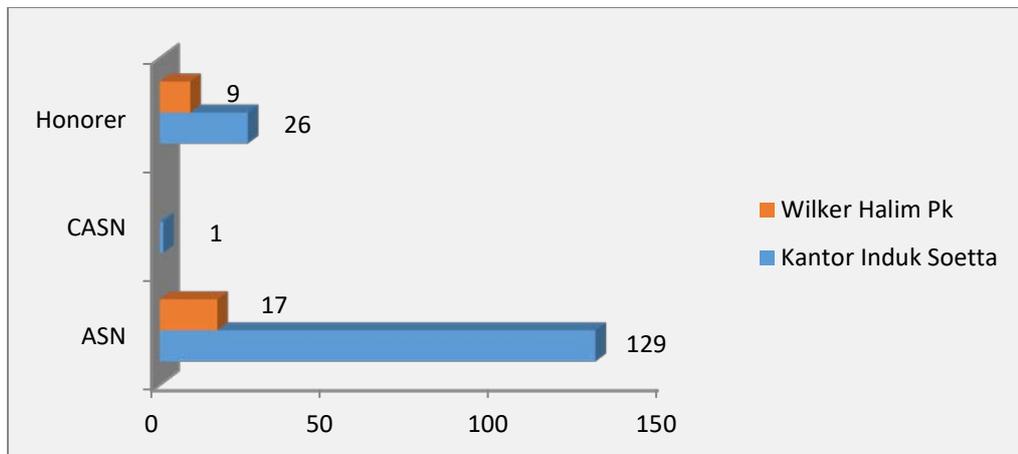
Dari grafik 1.5 terlihat bahwa dari 49 pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, persentase terbanyak adalah epidemiolog kesehatan 36,7% (18 orang) dokter umum 28,6% (14 orang). Sedangkan gambaran pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.6
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2018



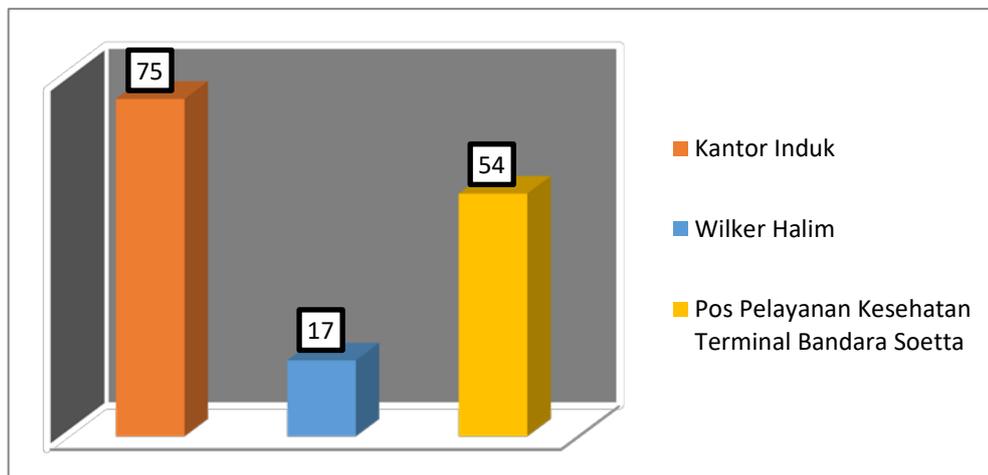
Berdasarkan grafik 1.6 terlihat bahwa dari 84 pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Umum, persentase terbanyak adalah Perawat 20.2% (18 orang), Dokter 17.8% (15 orang) dan pengadministrasi umum sebanyak 14 orang (16,7%). Penempatan pegawai berdasarkan tempat dinas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.7
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Berdasarkan Tempat Penempatan Tahun 2018



Dari grafik 1.7 dapat dilihat bahwa 156 pegawai di tempatkan di Kantor Induk KKP Kelas I Soekarno-Hatta (ASN = 129 orang, CASN = 1 orang, Honorer = 26 orang). Sedangkan di Wilker Halim Perdanakusuma sebanyak 26 orang (ASN = 17 orang, Honorer = 9 orang).

Grafik 1.8
Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Berdasarkan Penempatan Dinas Tahun 2018



Dari grafik 1.8 terlihat bahwa sebagian besar pegawai 51,3% (75 orang) berdinis di kantor induk KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Sebanyak 36,9% (54 orang) berdinis di pos pelayanan kesehatan terminal Bandara Soekarno-Hatta dan 11,6% (17 orang) di Wilker Halim Perdanakusuma.

Dari data distribusi pegawai diatas menunjukkan kekuatan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dari segi sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Saat ini Bandara Soekarno-Hatta semakin berkembang dengan penambahan terminal domestik dan internasional yang baru yaitu Terminal 3 Ultimate, maka kedepannya perlu peningkatan kemampuan kinerja Sumber Daya Manusia dari aspek kuantitas, kualitas, dan komposisi, dengan penambahan tenaga medis, pelatihan-pelatihan teknis, dalam rangka melaksanakan tugas rutin cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada unit utama Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kinerja yang telah dicapai.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 disusun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2461 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan yang terdiri dari:

- Bab I (Pendahuluan)
Menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, SDM, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)
Menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2018.
- Bab III (Akuntabilitas Kinerja)
Menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2018, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja
- Bab IV (Kesimpulan)
Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2018.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. KKP Kelas I Soekarno-Hatta menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015-2019

RAK KKP Kelas I Soekarno Hatta 2015–2019 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran program dalam Rencana Aksi Program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan. Dalam RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi unit kerja, namun mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu:

a. Visi

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

b. Misi

- 1) Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime.
- 4) Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 5) Bangsa berdaya saing.
- 6) Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.



7) Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi misi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita. KKP Kelas I Soekarno-Hatta sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, berkontribusi dalam Pembangunan Kesehatan Nasional demi terwujudnya agenda Nawa Cita ke-5 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.”

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta dalam periode tahun 2015 – 2019, yaitu menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan.

d. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta dalam periode tahun 2015 – 2019 adalah “Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara”.

Indikator pencapaian sasaran pada tahun 2018 dan 2019 berbeda dari tahun 2015-2018 dikarenakan adanya kebijakan Ditjen P2P untuk menyeragamkan indikator kinerja untuk seluruh KKP di Indonesia. Indikator pencapaian sasaran awal dan perubahan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja RAK Tahun 2015-2019
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Sebelum Perubahan

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2018	2018	2019
1	Persentase pengawasan lalu lintas alat angkut (pesawat) di pintu masuk negara	75%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang Direspon	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang di pintu masuk negara	87%	88%	90%	91,5%	93%
4	Persentase pemeriksaan/pengawasan lalu lintas orang sakit dan jenazah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase penerbitan dokumen OMKABA Ekspor	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pemeriksaan P3K pesawat	50%	55%	50%	50%	50%
7	Persentase penerbitan sertifikat sanitasi pesawat	-	-	100%	100%	100%
8	Persentase sarana air minum di lingkungan bandara yang dilakukan pengawasan	75%	75%	80%	80%	85%
9	Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	83,3%	84%	92,5%	95%	97,5%
11	Persentase wilayah yang dilakukan pengendalian vektor terpadu	13,8%	28%	28%	28%	28%
12	Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan di bandara	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada situasi matra	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase pelayanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di bandara	90%	90%	91 %	92 %	93%
16	Persentase penilaian SAKIP dengan hasil AA	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Indikator Kinerja RAK Tahun 2018-2019
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Setelah Perubahan

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target	
			2018	2019
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	600 Sertifikat	600 Sertifikat
	2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%	100%
	3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	38.692 sertifikat	39.024 sertifikat
	4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	8 layanan	20 layanan
	5	Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 bandara	1 bandara
	6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	100.000 sertifikat	60.000 sertifikat
	7	Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	2 bandara	2 bandara
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	8	Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara	2 bandara
Menurunnya penyakit menular langsung	9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.000 orang	1.100 orang
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	10	Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu	1 lokasi	-
	11	Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	5 lokasi	-
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen	40 dokumen
	13	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	12 pelatihan	9 pelatihan
	14	Jumlah pengadaan sarana prasarana	2 unit	150 unit

e. Kebijakan Teknis

- 1) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit.
- 2) Peningkatan perlindungan kelompok berisiko.
- 3) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko lingkungan.
- 4) Pengendalian penyakit dan pemutusan rantai penularan.
- 5) Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah yang berdimensi lokal, nasional maupun internasional.
- 6) Mengutamakan upaya promotif & preventif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

f. Strategi Teknis

- 1) Memperkuat aspek legal
- 2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi
- 3) Melaksanakan intensifikasi, akselerasi dan inovasi program
- 4) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
- 5) Memperkuat Jejaring kerja dan kemitraan
- 6) Memperkuat manajemen logistik
- 7) Meningkatkan aplikasi teknologi pendukung
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis
- 9) Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program
- 10) Meningkatkan pengembangan teknologi preventif.

g. Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kkp kelas I soekarno-hatta melaksanakan lima kegiatan pada tahun 2018 yang terdiri dari:

- 1) Surveilans dan karantina kesehatan
- 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic
- 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
- 4) Pencegahan dan penegndalian penyakit tidak menular
- 5) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit



2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK Tahun 2015-2019 yang berisi indikator kinerja dan target tahunan, serta gambaran kegiatan dan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2018.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta disusun mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	600 sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	38.692 sertifikat
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	8 layanan
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 bandara

		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	100.000 sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	2 bandara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.000 orang
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	10. Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu	1 lokasi
		11. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	5 lokasi
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen
		13. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	12 pelatihan
		14. Jumlah pengadaan sarana prasarana	2 unit

Pada perjanjian kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.886.416.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam kurun waktu Januari – Desember 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015–2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator KKP Kelas I Soekarno-Hatta yang telah ditetapkan. Sesuai dengan dokumen Perjanjian KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018, terdapat 14 indikator kinerja dengan target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2018
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	600 sertifikat	729 sertifikat	121,5 %
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%	100%	100,0 %
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	38.692 sertifikat	42.579 sertifikat	110,0 %
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	8 layanan	13 layanan	162,5 %
5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 bandara	1 bandara	100,0 %
6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	100.000 sertifikat	156.351 sertifikat	156,4 %
7	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	2 bandara	2 bandara	100,0 %
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara	2 bandara	100,0 %
9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.000 orang	1.296 orang	129,6 %
10	Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu	1 lokasi	3 lokasi	300,0%
11	Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	5 lokasi	9 lokasi	180,0 %
12	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen	40 dokumen	100,0 %
13	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	12 pelatihan	12 pelatihan	100,0 %
14	Jumlah pengadaan sarana prasarana	2 unit	2 unit	100,0 %
RATA-RATA CAPAIAN				132,8 %

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana telah disajikan pada tabel 3.1 dari 14 indikator terdapat 7 indikator dengan capaian kinerja lebih dari 100%, 7 indikator dengan capaian kinerja 100%. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 yaitu 132,8%.

INDIKATOR 1

Jumlah Alat Angkut Sesuai Dengan Standar Kekearifanan Kesehatan

1. Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekearifanan Kesehatan dalam periode satu tahun. Target tahun 2019 yaitu 600 sertifikat yang terdiri dari 2 sub indikator, yaitu:

a. *Penerbitan Sertifikat Knock Down(Hapus Serangga)*

Penerbitan sertifikat Knock Down merupakan akhir rangkaian kegiatan pengawasan kegiatan hapus serangga agar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jika disinfeksi telah dilaksanakan sesuai persyaratan dan jumlah bahan disinfektan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, maka diterbitkan Sertifikat Hapus Serangga. Hal ini diberlakukan bagi pesawat yang berangkat menuju negara tertentu yang mempersyaratkan. Target tahun 2018 yaitu 200 sertifikat.

b. *Inspeksi Sanitasi Pesawat dan Penerbitan Sertifikat Sanitasi Pesawat*

Inspeksi sanitasi pesawat dilakukan dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi pesawat. Penerbitan sertifikat sanitasi pesawat dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara dan dalam rangka persiapan implementasi UU Karantina. Sertifikat diterbitkan apabila pesawat memenuhi kriteria tidak ditemukan faktor risiko penyakit dari segi lingkungan dan tidak ditemukan vektor dan binatang tular penyakit lainnya. Target tahun 2018 yaitu 400 pemeriksaan dan sertifikat.

Outcome dari indikator ini yaitu alat angkut (pesawat) memenuhi standar kekarantinaan kesehatan sehingga tidak menjadi faktor resiko penularan penyakit potensial wabah.

2. Cara Perhitungan

• Realisasi

Akumulasi jumlah sertifikat Knock Down, inspeksi dan penerbitan sertifikat sanitasi pesawat dalam satu tahun.

- Sertifikat Knock Down = 149 sertifikat
- Inspeksi dan sertifikat sanitasi pesawat = 580 sertifikat
- Jumlah = 729 sertifikat**

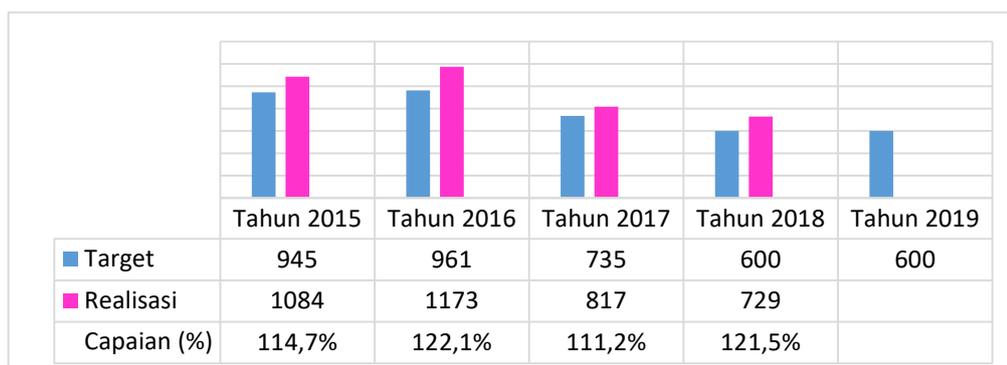
• Capaian

$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$	$\frac{729}{600} \times 100\% = \mathbf{121,5\%}$
---	---

3. Capaian Kinerja

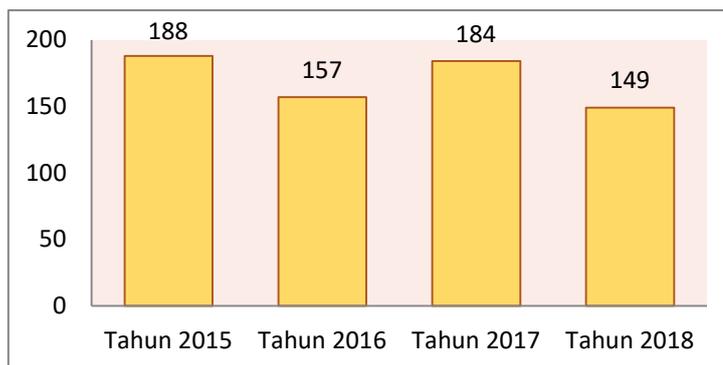
Pada tahun 2018 sertifikat yang diterbitkan terdiri dari sertifikat Knock Down sebanyak 149 sertifikat, sertifikat sanitasi pesawat sebanyak 93 sertifikat, dan pemeriksaan sanitasi pesawat yang memenuhi syarat sebanyak 437 pesawat.

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Keekarantinaan



Dari grafik 3.1 diketahui bahwa jumlah alat angkut yang sesuai dengan standar kekarantinaan pada tahun 2018 sebanyak 729 sertifikat dan sudah melebihi target dengan capaian sebesar 121,5%. Capaian tahun 2018 lebih besar dari tahun 2017 namun lebih rendah dari tahun 2015 dan 2016.

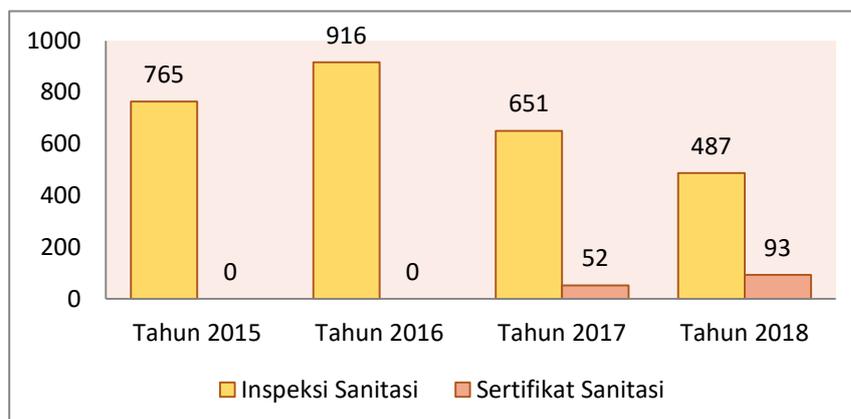
Grafik 3.2
Perbandingan Jumlah Penerbitan Sertifikat *Knock Down* (KD)



Dari grafik 3.2 dapat diketahui jumlah penerbitan sertifikat KD dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Jumlah penerbitan sertifikat KD fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 telah diterbitkan 188 sertifikat, lalu menurun pada tahun 2016 yaitu 157 sertifikat, meningkat kembali pada tahun 2017 yaitu 184 sertifikat, dan menurun kembali pada tahun 2018 yaitu sebanyak 149 sertifikat.

Jumlah sertifikat KD yang diterbitkan selama tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun tahun sebelumnya. Kegiatan penerbitan sertifikat KD selama ini dilaksanakan berdasarkan atas permintaan dari maskapai yang melayani penerbangan internasional dengan tujuan China (Peking dan Beijing) untuk maskapai Garuda Indonesia dan Citilink. Akan tetapi di pertengahan tahun 2018 Citilink menghentikan penerbangan ke negara tersebut, dan Garuda Indonesia mengurangi penerbangan di Soekarno Hatta karena mulai membuka penerbangan langsung tujuan Peking / Beijing dari Denpasar.

Grafik 3.3
Perbandingan Jumlah Inspeksi Sanitasi dan Penerbitan Sertifikat Sanitasi Pesawat



Dari grafik 3.3 dapat diketahui bahwa :

- Pada tahun 2015 terdapat 765 pesawat memenuhi syarat sanitasi
- Pada tahun 2016 terdapat 916 pesawat memenuhi syarat sanitasi
- Pada tahun 2017 terdapat 651 pesawat memenuhi syarat sanitasi dan 52 pesawat memiliki sertifikat sanitasi pesawat.
- Pada tahun 2018 terdapat 487 pesawat memenuhi syarat sanitasi dan 93 pesawat memiliki sertifikat sanitasi pesawat.

Pada tahun 2018 diberikan sertifikat sanitasi pesawat kepada 2 pesawat Sriwijaya Air dan 91 pesawat Garuda Indonesia. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 Bidang PRL belum melakukan sertifikasi pesawat dan baru terlaksana pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan tertulis yang menjadi dasar untuk digunakan oleh petugas.

Target indikator persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 95%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 577 sertifikat atau 121,5% dimana sudah melebihi target RAP.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Selain hal tersebut terdapat faktor keberhasilan dalam pemeriksaan sanitasi dan penerbitan sertifikat sanitasi pesawat yang telah mencapai target yaitu adanya deklarasi bersama yang ditanda tangani oleh Otoritas Bandara, PT. Angkasa Pura II, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta dalam mewujudkan pengendalian vektor dan sanitasi di area bandar udara Soekarno Hatta. Pencapaian target sanitasi pesawat juga ditunjang oleh dana yang telah disediakan dari Direktorat PTVZ.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

a. Penerbitan sertifikat Knock Down (KD)

KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah memfasilitasi penerbitan sertifikat KD sesuai dengan permintaan airlines, dengan jadwal permintaan penerbitan sertifikat menyesuaikan dari airlines. Pihak airlines melakukan koordinasi setiap bulan dengan bersurat yang ditujukan kepada kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta perihal jadwal penerbitan



sertifikat KD selama satu bulan dan akan segera ditindak lanjuti oleh petugas KKP. Alokasi anggaran telah disediakan kepada petugas KKP yang akan menerbitkan sertifikat KD karena kegiatan ini dilaksanakan diluar jam kerja menyesuaikan dengan permintaan airlines. Pembagian jadwal petugas KKP untuk KD juga telah dilakukan oleh KKP Soekarno Hatta sehingga setiap harinya dapat dilakukan penerbitan sertifikat KD sesuai dengan permintaan airlines.

b. *Pemeriksaan Sanitasi Pesawat dan Penerbitan Sertifikat Sanitasi Pesawat*

Pada tahun 2018 dilakukan dengan penyediaan alokasi anggaran, koordinasi kepada PT. Garuda Indonesia pada bulan Februari 2018 untuk kegiatan pada tahun berjalan, penguatan tim, dan penyerahan penghargaan kepada armada yang telah diperiksa pada bulan 04 April 2018.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- a. Kendala yang dihadapi di lapangan yaitu berupa ketidakpastian jadwal penerbitan sertifikat KD karena menyesuaikan permintaan airlines.
- b. Kendala yang dihadapi untuk inspeksi kesehatan lingkungan pesawat adalah kekurangan SDM dibandingkan dengan jumlah armada yang harus diperiksa.
- c. Alokasi dana yang direncanakan belum mencakup seluruh jumlah armada pesawat yang harus diperiksa.
- d. Koordinasi yang dilakukan harus dilakukan secara berkala kepada seluruh maskapai domestik dan internasional.

7. Pemecahan Masalah

- a. Kegiatan penerbitan sertifikat KD ini memerlukan kerjasama yang baik antara petugas KKP dengan airlines, maka dari itu dibutuhkan ketepatan dan kecepatan informasi tentang jadwal disinspeksi pesawat. Adakalanya pihak airlines melakukan pembatalan penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan. Pihak airlines diharapkan segera menginformasikan kepada pihak KKP melalui bersurat sebelumnya.



- c. Menambah SDM yang terampil di bidang kesehatan lingkungan
- d. Membuat peraturan menteri kesehatan dan Standar Operasional Prosedur yang berkesinambungan dari Undang – Undang Nomor 6 tahun 2018
- e. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh maskapai domestik dan internasional di wilayah bandara Soekarno Hatta.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut dengan alokasi anggaran Rp. 43.680.0000,-
- b. Pengawasan dan pemeriksaan vektor di pesawat dalam rangka penerbitan sertifikat bebas serangga atau hapus serangga dengan alokasi anggaran Rp. 31.500.000,-

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Jumlah petugas yang terlatih Knock Down hanya ada 3 orang, dan dibagi menjadi 3 grup sebagaimana jadwal dinas di lapangan, sehingga setiap hari ada petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan penerbitan sertifikat Knock Down.

INDIKATOR 2

Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

1. Definisi Operasional

Jumlah sinyal SKD KLB (Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa) di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun. Target tahun 2019 yaitu 100%. Outcome dari indikator ini yaitu terkendalinya semua respon sinyal SKD di wilayah layanan KKP Kelas I Soekarno-Hatta, sehingga kemungkinan kejadian KLB dapat dicegah dan faktor risiko penyakit KLB wabah dapat dikendalikan.

2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam

- Jumlah sinyal SKD KLB = 9 sinyal
- Jumlah sinyal SKD KLB yang direspon kurang dari 24 jam = 9 sinyal
- Realisasi = $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$

- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

3. Capaian Kinerja

Pada tahun 2018 terdapat 9 sinyal SKD KLB yang muncul dan dapat segera direspon kurang dari 24 jam, sehingga capaian pada tahun 2019 sebesar 100%. Respon tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Bulan Maret 2018 terdapat **1 kasus** yang direspon yaitu melalui koordinasi dengan Dinkes Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk kerjasama KKP dan wilayah dalam merespon Sinyal Kewaspadaan Dini. Respon terhadap kasus dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan epidemiologi kepada kasus dan kontak dekat kasus pada tanggal 14 Maret 2018. Penyelidikan epidemiologi yang dilakukan

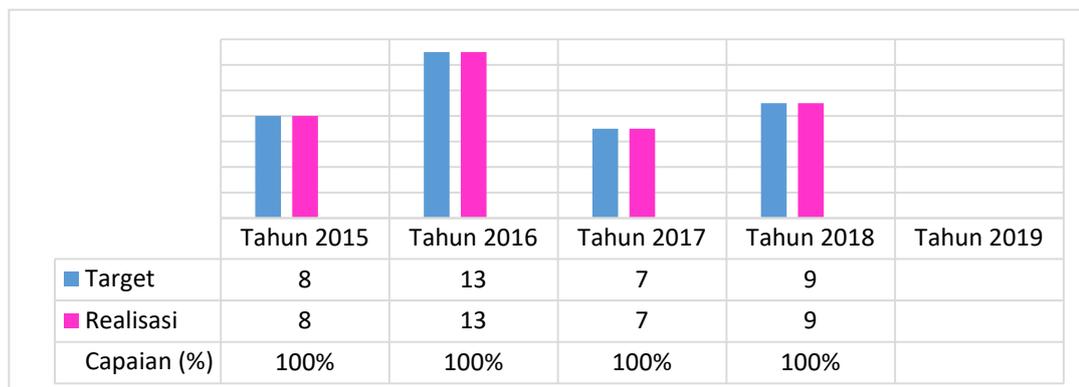


terhadap kasus tersebut adalah dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan baik secara langsung yaitu mendatangi tempat dirawatnya suspect tersebut yaitu di Rumah Sakit EKA HOSPITAL BSD Tangerang Selatan maupun secara tidak langsung dengan data-data yang diperoleh dari dinas kesehatan dan keluarga pasien. Dari hasil penyelidikan kasus dan informasi dari rumah sakit setelah dilakukan perawatan didapatkan hasil bahwa yang bersangkutan dinyatakan negatif menderita penyakit MERS-CoV.

- b. Pengawasan TNI merupakan salah satu respon sinyal kewaspadaan dini terhadap penumpang yang datang langsung dari negara endemis Yellow Fever dan Ebola. Pada tahun 2018 terdapat **6 kali** penerbangan langsung dari negara endemis yang datang di bandara Soekarno Hatta pada bulan Januari, April, Agustus, dan Desember dan telah dilakukan respon berupa kegiatan screening pemeriksaan suhu tubuh dengan hasil pemeriksaan sebanyak 1.635 penumpang dan 80 crew dengan suhu $\leq 38^{\circ} \text{C}$.
- c. Pada bulan Juni 2018 terdapat **1 penemuan kasus** malaria di klinik Garuda Sentra Medika bandara Soekarno kemudian dilakukan investigasi untuk memastikan kasus. Hasil yang didapat bahwa karyawan tersebut memang terdiagnosa malaria namun bukan berpenyakit malaria. Hal tersebut dikarenakan pasien akan bepergian ke daerah endemis malaria di Papua sehingga dikeluarkan obat malaria. Telah dilakukan pembinaan kepada klinik yang bersangkutan untuk tidak memberikan diagnose malaria tanpa gejala dan hasil laboratorium. Anjuran agar melakukan pemeriksaan darah RDT setelah pulang dari daerah endemis malaria, dan melaporkan kasus potensial wabah dalam 1x24 jam kepada KKP.
- d. Pada saat **embarkasi dan debarkasi** haji juga dilakukan respon sinyal kewaspadaan terhadap jamaah haji. Hasil kegiatan tersebut didapatkan 13 orang jamaah haji mempunyai gejala panas dengan suhu $\geq 38^{\circ} \text{C}$, dan dilakukan observasi lebih lanjut untuk memastikan jamaah tersebut kemungkinan berpenyakit potensial wabah (MERS-CoV). Selanjutnya dilakukan pemberian kartu kewaspadaan dan notifikasi ke wilayah untuk ditindak lanjuti dan dilakukan pemantauan.



Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Respon Sinyal SKD KLB dan Bencana di Wilayah KKP



Dari grafik diatas diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 semua respon sinyal SKD, KLB, dan bencana telah direspon kurang dari 24 jam, sehingga capaiannya 100%. Target pada tahun 2019 pun 100% sinyal SKD, KLB, dan bencana direspon kurang dari 24 jam. Dalam kurun waktu 4 tahun, jumlah sinyal SKD pada tahun 2016 paling tinggi yaitu 13 kasus, menurun di tahun 2017 sebanyak 7 kasus, dan meningkat kembali pada tahun 2018 sebanyak 9 kasus.

Target indikator persentase sinyal kewaspadaan dini yang tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 80%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 100% sinyal SKD telah direspon, dimana sudah melebihi target Renstra dan RAP.



Capaian indikator persentase sinyal kewaspadaan dini KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 sama dengan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100% sinyal KLB direspon.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena terdeteksinya setiap sinyal KLB oleh petugas di pintu masuk dan di wilayah sehingga dapat dilakukan respon dengan cepat dan tepat. Untuk sinyal KLB di wilayah petugas bekerja sama dan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait dalam melakukan respon.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

Melakukan pembaharuan data baik internal maupun eksternal, dan melakukan jejaring surveilans dengan lintas sektor dan lintas program baik di internal bandara maupun di wilayah. Melakukan penyegaran, pelatihan, kepada petugas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dituangkan dalam Tim Gerak Cepat (TGC) Bandara Soekarno-Hatta.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Dalam pengawasan lalu lintas orang ada beberapa kendala yaitu kemungkinan orang yang datang dalam kondisi belum menunjukkan gejala atau telah meminum obat sehingga dengan alat pemindai suhu tidak terdeteksi, sehingga tidak dilakukan pengamatan lebih lanjut di pintu masuk.

7. Pemecahan Masalah

Memberikan KIE / promosi kesehatan secara efektif salah satunya dengan memberikan pengumuman di pesawat tentang kewajiban bagi penumpang yang mengalami gejala untuk segera melapor ke KKP. Perlu meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor terutama dengan pihak imigrasi untuk melihat asal penumpang yang datang dari negara endemis atau bukan dan kerjasama dengan pihak AOC, groundhandling, dan klinik non KKP dalam hal pendeteksian dan pelaporan.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Jejaring surveilans dan kemitraan dengan alokasi anggaran Rp. 40.860.000,-



- b. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya dengan alokasi anggaran Rp. 88.277.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat luar negeri dalam sehari sebanyak \pm 250 pesawat dengan 45.000 penumpang dan 2.300 crew. Sedangkan petugas KKP yang berjaga di terminal internasional sebanyak 7 orang dengan tugas yang harus dilakukan yaitu pengawasan keberangkatan penumpang (jamaah umroh), pengawasan kedatangan melalui thermoscan, pengawasan lalu lintas orang sakit, dan standby penumpang sakit di klinik. Dengan beban kerja tersebut dan jumlah personil di lapangan yang tidak seimbang, dalam pelaksanaannya KKP Kelas I Soekarno-Hatta bekerja sama dengan seluruh airlines melalui AOC, groundhandling, dan petugas klinik non KKP di terminal (MSA) dan 7 klinik non KKP di area lingkungan bandara baik dari sisi pendeteksian dan penanganan kasus.
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 105.237.000 atau 81,5% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 129.137.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%



INDIKATOR 3

Jumlah Deteksi Dini Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit

1. Definisi Operasional

Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun. Outcome dari indikator ini yaitu terdeteksinya semua faktor risiko masuk dan keluarnya penyakit yang terdapat dalam alat angkut dan muatannya. Target pada tahun 2019 yaitu 40.920 dokumen, yang merupakan gabungan dari 3 sub indikator yaitu:

a. *Penerbitan Certificate of Pratique (COP)*

Sertifikat COP yaitu dokumen kesehatan yang diberikan kepada pesawat yang datang dari luar negeri.

b. *Pengawasan Dokumen Kesehatan (Health Part of General Declaration /Gendec) Pesawat Internasional*

Pemeriksaan Gendec merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot, berupa catatan adanya orang sakit selama penerbangan.

c. *Surveilans rutin*

Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma dilakukan

2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec, dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam satu tahun Jumlah sinyal SKD KLB

- Dokumen COP	= 304 dokumen
- Dokumen Gendec	= 42.263 dokumen
- Surveilans rutin	= 12 dokumen
JUMLAH	= 42.579 dokumen

- **Capaian**

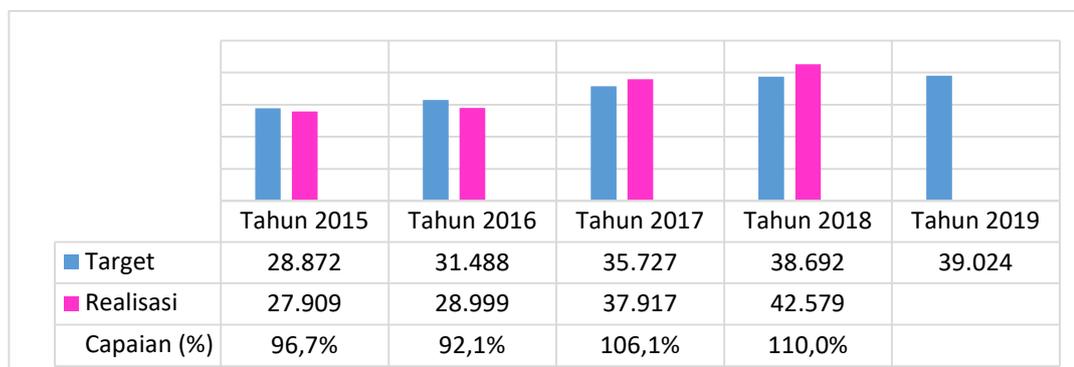
$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{42.579 \text{ dokumen}}{38.692 \text{ dokumen}} \times 100\% = \mathbf{110\%}$$



3. Capaian Kinerja

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Deteksi Dini
Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit



Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal penyakit pada tahun 2018 sebanyak 42.579 dokumen dan sudah mencapai target dengan capaian sebesar 110%. Realisasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 meningkat setiap tahun. Walaupun pada tahun 2015 dan tahun 2016 sempat tidak mencapai target.

a. Dokumen COP

COP merupakan dokumen kekarantinaan dalam bentuk sertifikat, dibagi menjadi dua kriteria yaitu bebas karantina dan karantina terbatas. Sebagai syarat penerbitan COP adalah maskapai menyerahkan Gendec, menyatakan bahwa P3K pesawat lengkap dan sertifikat sanitasi pesawat masih berlaku. Setelah pesawat mendapatkan COP maka pesawat diperbolehkan untuk menurunkan penumpang dan muatannya. Penerbitan COP pada tahun 2018 adalah terdiri dari COP pesawat komersil dan COP pesawat haji.

Kegiatan ini baru dimulai pada tahun 2018 di bulan Agustus s/d Desember 2018 karena SOP penerbitan COP untuk pesawat terbang masih merupakan prototype bagi penerbangan dan belum diatur dalam PP 21 tahun 2013 tentang PNPB. Penerbitan dokumen COP pada tahun 2018 terdiri dari dokumen COP saat kedatangan pesawat haji sebanyak 159 dokumen, kedatangan pesawat internasional di terminal 2D sebanyak 23 dokumen, dan kedatangan pesawat internasional di terminal 3 internasional sebanyak 122 dokumen.

b. *Dokumen Gendec*

Grafik 3.6
Perbandingan Jumlah Pengawasan Dokumen Gendec

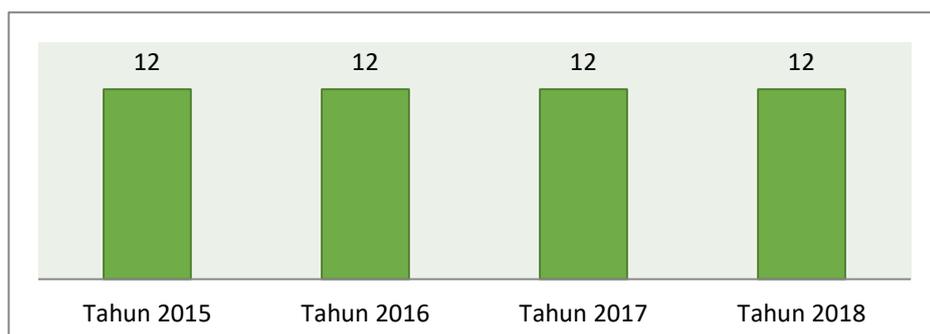


Dari grafik 3.6 diketahui jumlah pengawasan Gendec dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Jumlah pengawasan Gendec mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 yaitu 27.897 dokumen, tahun 2016 sebanyak 28.979 dokumen, tahun 2017 sebanyak 37.959 dokumen, dan pada tahun 2018 sebanyak 42.263 dokumen.

Gendec adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap penerbangan baik yang akan berangkat maupun yang akan mendarat. Gendec merupakan pernyataan dari pilot penerbang terkait hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya terhadap penerbangan, baik terhadap pesawat, orang dan muatannya. Salah satu bagian dari Gendec disebut sebagai HPAGD (Health Part of Aircraft General Declaration) yang artinya bahwa pilot menyatakan status kesehatan baik di pesawat maupun terhadap penumpang yang dibawa. Hasil pemeriksaan Gendec pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tidak ada penumpang/crew yang berpenyakit menular potensial wabah.

c. *Surveilans Rutin*

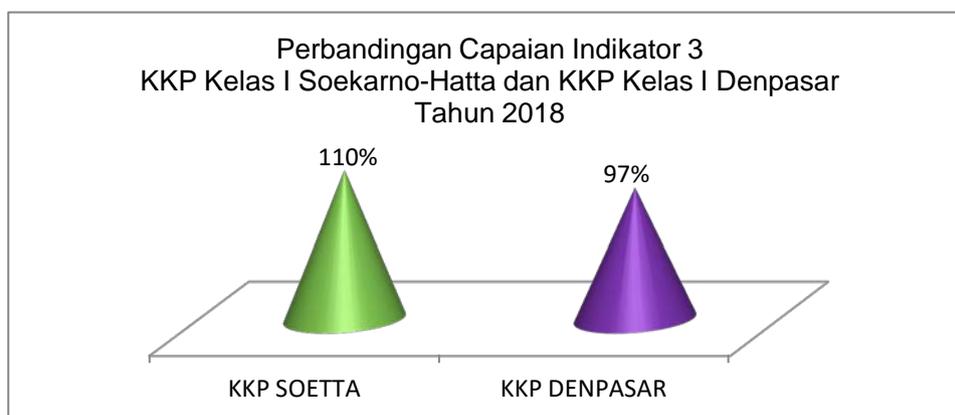
Grafik 3.7
Perbandingan Jumlah Surveilans Rutin



Berdasarkan grafik 3.7 dapat diketahui bahwa jumlah kegiatan surveilans rutin pada setiap tahun, dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yaitu sebanyak 12 kali. Kegiatan surveilans rutin dilaksanakan rutin setiap bulan.

Pengawasan terhadap faktor risiko PHEIC yang dilaksanakan di KKP Kelas I Soekarno-Hatta berupa kegiatan peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) terhadap faktor risiko terjadinya PHEIC, yang dilakukan oleh empat bidang, yaitu Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan Lintas Wilayah dan Bidang Tata usaha. Dari data hasil kegiatan dan pengawasan tersebut dikumpulkan untuk diolah kemudian dilakukan analisis bersama untuk mengetahui ada/tidaknya atau besar/kecilnya faktor risiko yang berpotensi dapat menimbulkan PHEIC di Bandara Soekarno-Hatta.

Pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 tidak terdapat indikator tersebut, namun indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dapat mendukung pencapaian indikator persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon.



Capaian indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit KKP Kelas I Soekarno Hatta pada tahun 2018 sebesar 110% lebih besar dibandingkan KKP Kelas I Denpasar yaitu 97%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena jejaring kinerja petugas KKP dengan lintas sektor di Bandara semakin baik. Sistem informasi dalam pelaporan Gendec semakin baik, laporan rutin melalui media elektronik semakin cepat dan petugas KKP di lapangan semakin terlatih karena telah dilakukan pelatihan kekarantinaan bagi petugas.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

Sosialisasi tupoksi KKP kepada lintas sektor dan lintas program terkait dalam upaya meningkatkan kerjasama.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Sering adanya pergantian pejabat di lintas sektor sehingga jejaring yang telah terbina dengan pejabat lama harus dilakukan lagi.

7. Pemecahan Masalah

Sosialisasi terhadap tupoksi dan jejaring yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Koordinasi program karantina kesehatan dengan alokasi anggaran Rp. 44.400.000,-
- b. Bimtek ke wilker dengan alokasi anggaran Rp. 13.200.000,-
- c. Pelaksanaan surveilans KKM terintegrasi dengan alokasi anggaran Rp. 63.385.000,-
- d. Layanan kekarantinaan kesehatan di Bandar Udara dengan alokasi anggaran Rp.1.793.610.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Memaksimalkan sistem pelaporan dan permohonan dokumen secara online melalui Whatsapp, email, aplikasi, dan lain-lain.
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 1.907.349.304 atau 99,6% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.914.595.000,- dengan capaian kinerja sebesar 110%.



INDIKATOR 4

Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus

1. Definisi Operasional

Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain dalam periode satu tahun. Target pada tahun 2019 yaitu 8 posko. Outcome dari indikator ini yaitu terlayannya masyarakat di wilayah layanan KKP pada situasi khusus seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru dan lain-lain sehingga dapat meminimalisir penyakit yang mungkin timbul akibat situasi mata dan menurunkan angka kesakitan bagi masyarakat, penyelenggara dan pengguna jasa bandara.

2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru, dan lainnya dalam satu tahun yaitu:

Tabel 3.2
Realisasi Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus Tahun 2018

No	Event	Waktu	Lokasi	Jumlah Layanan	Jumlah Kunjungan (orang)
1.	Test Event Asian Games	Februari 2018	Bandara Soetta	1	0
2.	Posko Mudik Lebaran	Juni 2018	Bandara Soetta & Halim	2	1.551
3.	Embarkasi Haji	Juli 2018	Bandara Soetta & Asrama Haji Jakarta	2	542
4.	Asian Games	Agustus 2018	Bandara Soetta	1	0
5.	Debarkasi Haji	September 2018	Bandara Soetta & Halim	2	559
6.	Asian Paragames	Oktober 2018	Bandara Soetta	1	0
7.	Pos Lion JT 610	November 2018	Bandara Soetta & Halim	2	5
8.	Nataru	Desember 2018	Bandara Soetta & Halim	2	643
Total				13	3.300

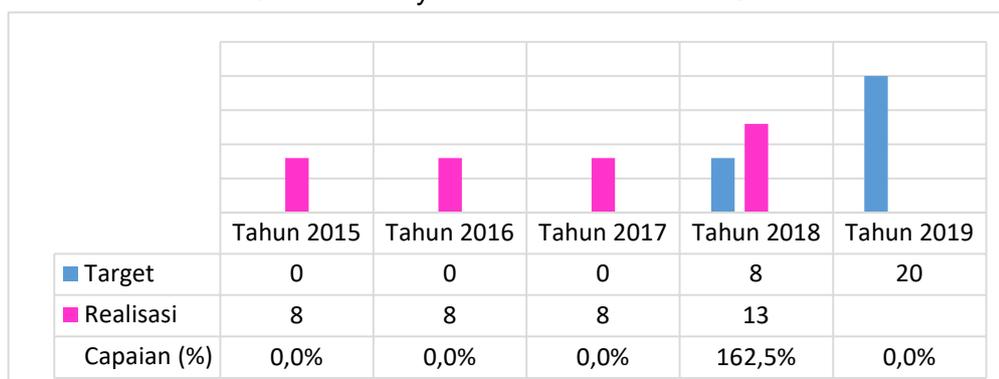
- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{13 \text{ layanan}}{8 \text{ layanan}} \times 100\% = 162,5\%$$

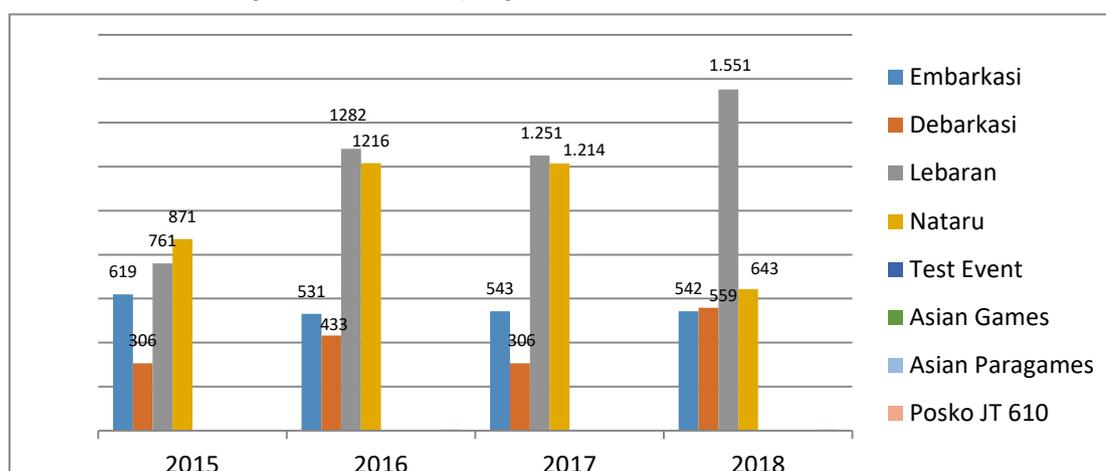
3. Capaian Kinerja

Grafik 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus



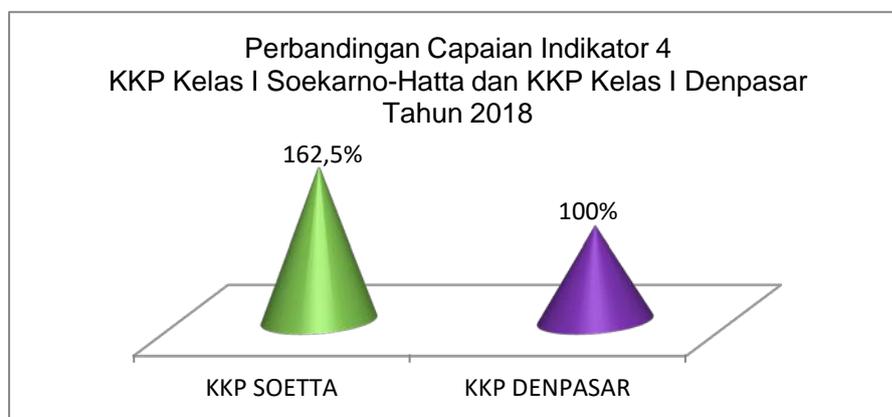
Dari grafik diatas diketahui bahwa realisasi jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus tahun 2018 sebanyak 13 layanan, lebih besar dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Capaian tahun 2018 sebesar 162,5 % tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2015 hingga tahun 2017, definisi operasional dari target yang ditetapkan yaitu jumlah orang yang terlayani bukan jumlah layanan.

Grafik 3.9
Perbandingan Jumlah Kunjungan Pos Kesehatan Pada Situasi Khusus



Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah kunjungan terbanyak di pos pelayanan kesehatan pada situasi khusus tahun 2018 adalah kunjungan pada pelayanan kesehatan situasi khusus arus mudik lebaran sebanyak 1.551 orang. Adapun jenis pelayanan yang diberikan pada saat situasi khusus yaitu : Pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pengobatan, penerbitan dokumen kesehatan laik terbang dan tidak laik terbang, penanganan gawat darurat medis dan layanan rujukan.

Pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 tidak terdapat indikator tersebut, namun indikator jumlah pelayanan pada situasi khusus dapat mendukung pencapaian indikator persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson.



Capaian indikator jumlah pelayanan pada situasi khusus KKP Kelas I Soekarno Hatta pada tahun 2018 sebesar 162,5% lebih besar dibandingkan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100%. Hal ini dikarenakan banyaknya event internasional yang berlokasi di Jakarta pada tahun 2018.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai dikarenakan terdapat alokasi anggaran untuk pelayanan situasi khusus termasuk event – event internasional seperti Invitation Tournamen, Asian Games dan Asian Paragames. Adapun Pelayanan Kesehatan Posko Lion JT 610 bisa terlaksana meski tidak teranggarkan dalam dipa karena KKP kelas I Soekarno Hatta bekerjasama dengan Pusat Krisis Kemenkes RI untuk pembiayaan kegiatan posko Lion JT 610.

Pelayanan Situasi Khusus arus mudik bisa terlaksana dengan memberdayakan SDM yang ada dengan sistem lembur/ overtime selain itu juga untuk posko terpadu Arus Mudik KKP Kelas I Soekarno Hatta Melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk kegiatan Invitation Tournamen, Asean Games dan Asian Paragemes.

Sedangkan Untuk Kegiatan Invitation Tournamen, Asian Games dan Asian Para Games KKP Kelas I Soekarno Hatta bekerjasama dengan Kimia Farma, RS Sitanala karena tersedianya alokasi anggaran untuk situasi

husus, SDM tenaga medis dan non medis, serta capaian dapat melebihi target karena terdapat event lain diluar situasi khusus rutin setiap tahunnya berupa event Internasional yang berlangsung pada tahun 2018.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan pada pelayanan kesehatan dalam situasi khusus adalah melakukan edukasi dan promosi kesehatan kepada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan dan pengobatan dan mengeluarkan dokumen kesehatan bagi pelaku perjalanan yang membutuhkan.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan pada situasi khusus di tahun 2018 yaitu lokasi pos pelayanan kesehatan khususnya pada saat situasi Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang kurang strategis, sehingga agak sulit dijangkau oleh pengguna jasa bandara.

7. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, dilakukan koordinasi dengan lintas sektoral dalam hal penempatan lokasi pos pelayanan kesehatan pada situasi khusus sehingga pos pelayanan kesehatan bisa ditempatkan dilokasi yang mudah dijangkau atau pengguna jasa bandara, serta melibatkan pos pelayanan kesehatan rutin untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan pada situasi khusus.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Pengawasan arus mudik pada situasi khusus dengan alokasi anggaran Rp. 113.960.000,-
- b. Pelayanan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp. 1.773.644.000,-
- c. Layanan kesehatan rujukan dengan alokasi anggaran Rp. 65.000.000,-



- d. Cegah tangkal penyakit dalam pelaksanaan Asean games & Para Games dengan alokasi anggaran Rp. 88.800.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Optimalisasi tenaga dokter, perawat dan driver guna menunjang kegiatan pelayanan kesehatan pada periode situasi khusus. Tenaga dokter, perawat dan driver yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah petugas yang libur, sehingga tidak mengganggu pos pelayanan kesehatan rutin
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 2.016.831.000,- atau 98,8% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.041.404.000,- dengan capaian kinerja sebesar 162,5%.



INDIKATOR 5

Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Berpotensi Wabah

1. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. Target pada tahun 2019 yaitu 1 dokumen.

Outcome dari indikator ini yaitu Bandara Soekarno-Hatta siap menanggulangi kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah melalui kesepakatan yang terwujud dari berbagai pihak terkait di lingkungan Bandara Soekarno Hatta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC).

2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{1 \text{ bandara}}{1 \text{ bandara}} \times 100\% = 100\%$$

3. Capaian Kinerja

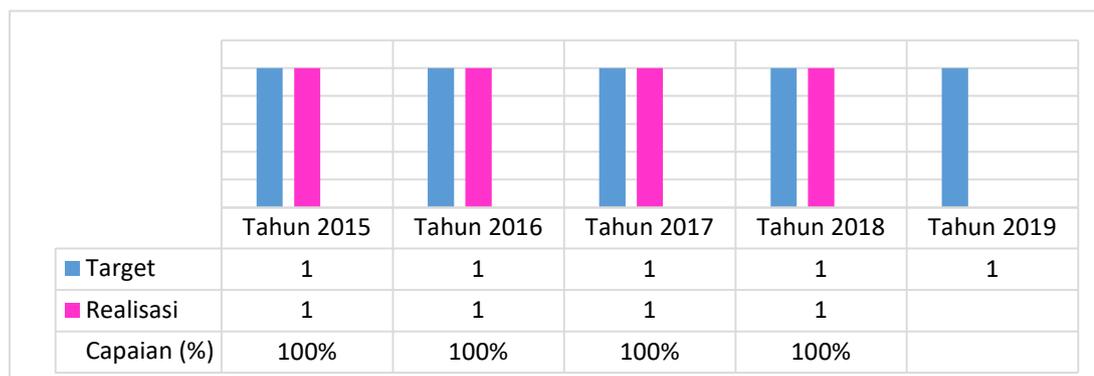
Pada tahun 2018 telah terlaksana review dokumen rencana kontijensi di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 18 Desember 2018 di Ruang Rapat Anyelir Kantor Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno Hatta dengan 55 orang peserta dari lintas sektor terkait di bandara dan lintas sektor lainnya di lingkungan sekitar bandara yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas. Hasil kegiatan review renkon di Bandara Soekarno Hatta yaitu :

- Memasukkan paradigma baru tentang ancaman kesehatan masyarakat secara global telah berubah, yaitu bukan hanya penyakit karantina seperti

Pes, Kolera dan Yellow Fever tetapi ancaman yang lebih luas yaitu yang terkait dengan nuklir, biologi dan kimia.

- Penyesuaian terhadap sumber daya terutama sumber daya alat yang disesuaikan dengan ancaman yang ada.
- Memasukkan beberapa lintas sektor yang berada di luar bandara terkait dengan agen-agen ancaman.
- Pemahaman mengenai pentingnya Rencana Kontingensi yang kemudian dapat dilaksanakan jika sewaktu waktu terjadi kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.

Grafik 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandar Udara/PLBD yang Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah



Dari grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah bandara yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan sudah mencapai target dengan capaian 100%. Realisasi dan capaian tahun 2018 sama dengan tahun 2015, 2016, dan 2017. Dimana setiap tahunnya dilakukan review dokumen rencana kontijensi secara bergilir antara Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Target indikator persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 82%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 1 bandara atau 100%, telah menyumbang pencapaian target RAP.



Capaian indikator persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah tahun 2018 KKP Kelas I Soekarno Hatta pada tahun 2018 sebesar 100% lebih besar dibandingkan KKP Kelas I Denpasar yaitu 75%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena salah satu persyaratan minimal untuk kemampuan utama bagi *point of entry* sebagaimana dimuat dalam IHR 2005 adalah harus memiliki rencana kontingensi respon menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan adanya kebutuhan terhadap penyesuaian isu-isu terbaru terkait dengan ancaman yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa upaya telah dilakukan antara lain :

- a. Dalam pelaksanaan tugas cegah tangkal di pintu masuk negara senantiasa mengacu kepada SOP yang tertuang dalam dokumen rencana kontingensi terdahulu.
- b. Memetakan beberapa masalah dan perubahan situasi dan kondisi di lapangan sehingga reviu rencana kontingensi dilaksanakan dalam rangka penyesuaian
- c. Menerima saran dari berbagai pihak yang terkait saat terjadi kasus sebagai bahan untuk melakukan reviu rencana kontingensi

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- a. Masih ada anggapan bahwa masalah kesehatan hanya dilaksanakan oleh KKP.
- b. Informasi yang diterima di tingkat pimpinan di masing-masing lintas sektor masih belum tersosialisasi sampai ke tingkat bawah.

7. Pemecahan Masalah

- a. Memperbanyak pertemuan dengan lintas sektor dalam rangka sosialisasi rencana kontingensi
- b. Peningkatan kapasitas petugas di lapangan dan kerja sama lintas sektor dalam bentuk simulasi yang berbasis pelayanan yang ada di bandara
- c. Meminta dukungan penuh dari lintas sektor untuk dapat menyampaikan segala hal yang terkait dengan rencana kontingensi terutama jika terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat agar sampai ke petugas di lapangan

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu review dokumen rencana kontingensi di bandara Soetta dengan alokasi anggaran Rp. 41.642.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Optimalisasi petugas yang ada di lapangan dan bekerja sama dengan bidang lainnya serta memanfaatkan jejaring kerja dengan lintas sektor dalam rangka deteksi dan respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi inti utama dari rencana kontingensi.
- b. Optimalisasi peralatan baik yang dimiliki oleh KKP maupun sumber daya lain yang dimiliki oleh lintas sektor dapat mendukung rencana kontingensi yang ada.
- c. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 40.765.800,- atau 97,9% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 41.642.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



INDIKATOR 6

Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

1. Definisi Operasional

Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun. Pelayanan penerbitan dokumen kesehatan di KKP Kelas I Soekarno-Hatta terdiri dari penerbitan surat keterangan sakit, surat keterangan sehat, surat laik terbang, surat tidak laik terbang, surat ijin angkut jenazah, surat keterangan kematian, surat visum. Target pada tahun 2018 yaitu 100.000 sertifikat.

Outcome dari indikator ini yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di wilayah layanan KKP terhadap sertifikat/surat izin layanan kesehatan sehingga pelaku perjalanan terhindar dari gangguan kesehatan selama penerbangan dan di tempat tujuan.

2. Cara Perhitungan

• Realisasi

Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun

- Penerbitan ICV	= 139.210 sertifikat
- Surat kelaikan terbang	= 13.210 surat
- Surat sehat	= 559 surat
- Surat sakit	= 120 surat
- Surat Izin Angkut Jenazah	= 2.993 surat
- Sertifikat Sehat	= 259 sertifikat
JUMLAH	= 156.351 sertifikat/surat

• Capaian

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

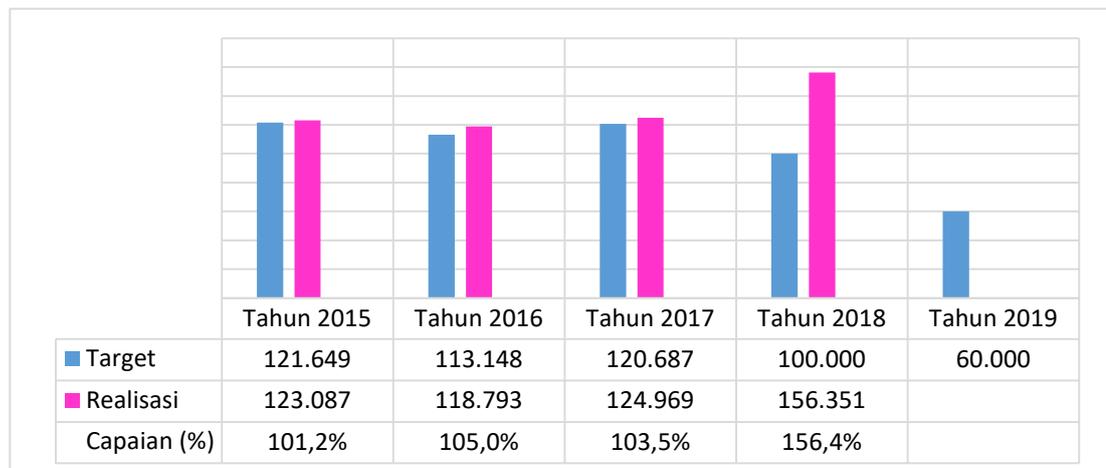
$$\frac{156.351 \text{ sertifikat}}{100.000 \text{ sertifikat}} \times 100\% = \mathbf{156,4\%}$$

3. Capaian Kinerja

Pada tahun 2018, jumlah penerbitan sertifikat/surat ijin layanan kesehatan sebanyak 156.351 sertifikat yang terdiri dari:

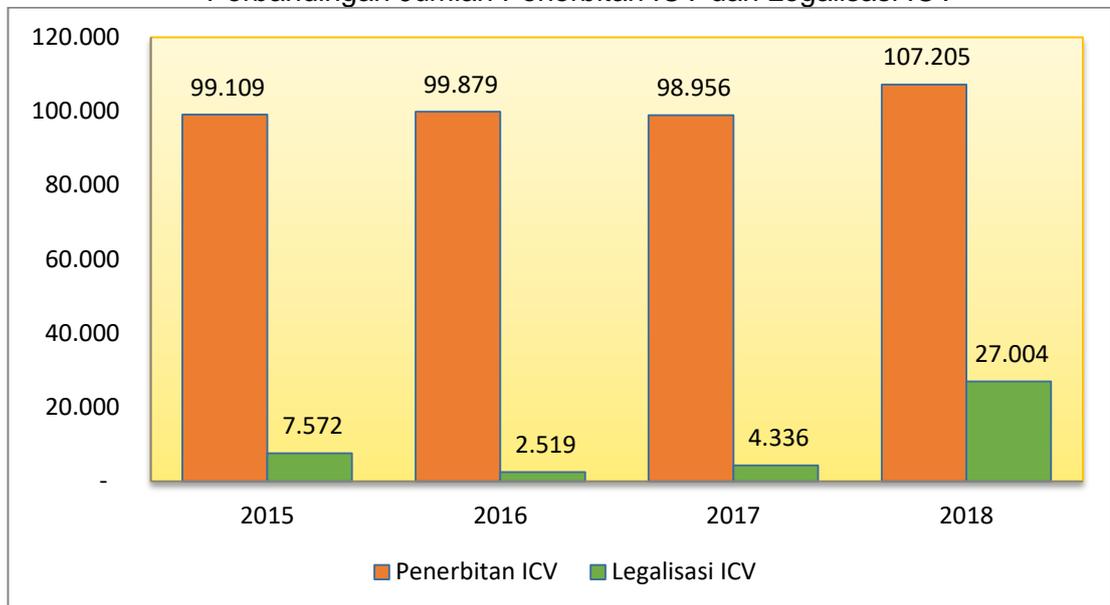


Grafik 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang Diterbitkan



Dari grafik 3.11 diketahui bahwa jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan yang diterbitkan pada tahun 2018 sebanyak 156.351 sertifikat dan sudah mencapai target dengan capaian 156,4%. Realisasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah mencapai target dengan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi menurun dari tahun 2015 dan meningkat kembali pada tahun 2017 dan 2018.

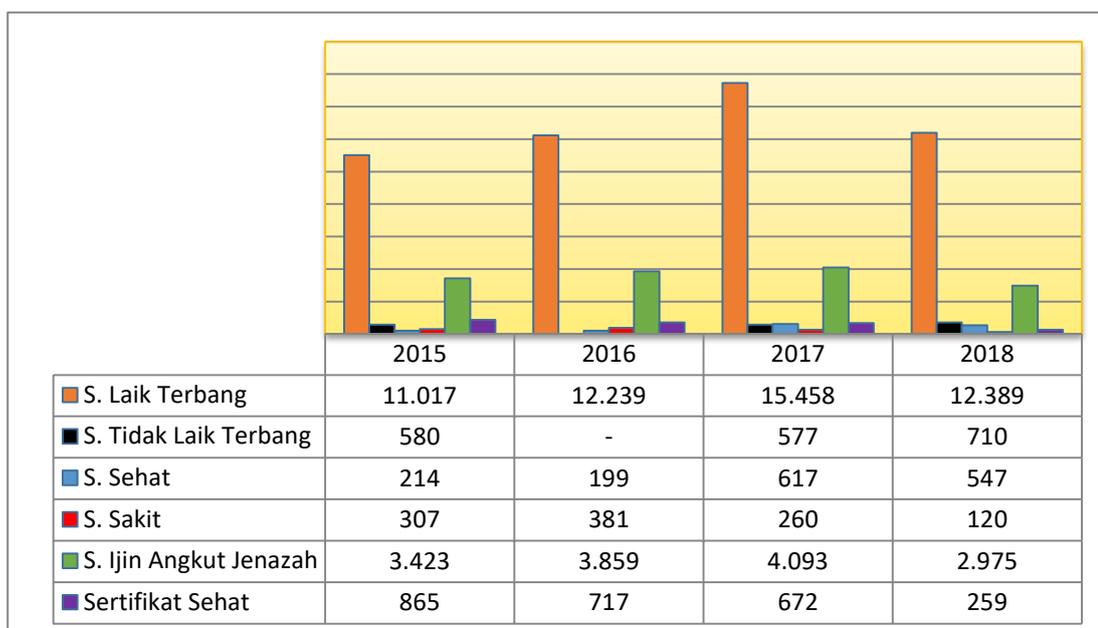
Grafik 3.12
Perbandingan Jumlah Penerbitan ICV dan Legalisasi ICV



Dari grafik 3.12 dapat diketahui jumlah penerbitan ICV pada tahun 2015 sebanyak 99.109 sertifikat, tahun 2016 sebanyak 99.879 sertifikat, lalu menurun pada tahun 2017 dengan jumlah 98.956 sertifikat, dan meningkat kembali pada tahun 2018 sebanyak 107.205 sertifikat.

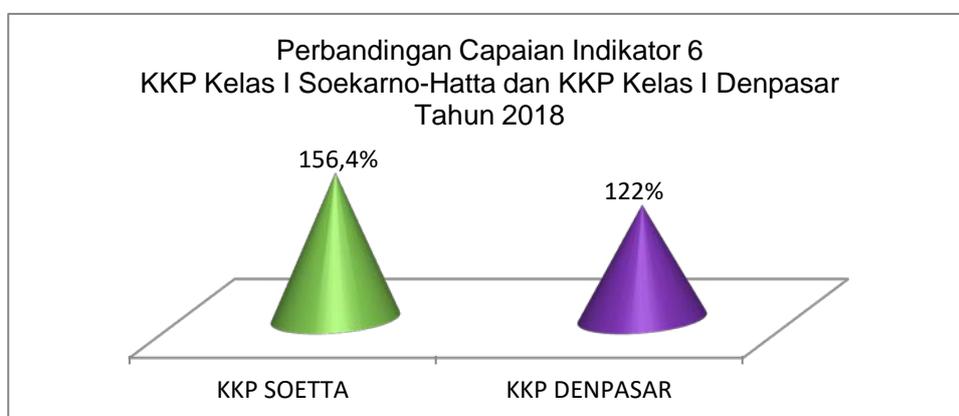
Legalisasi ICV dari tahun 2015 sampai tahun 2018 jumlahnya fluktuatif, pengajuan paling rendah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 2.519 sertifikat dan pengajuan paling tinggi pada tahun 2018 sebanyak 27.004 sertifikat.

Grafik 3.13
Perbandingan Jumlah Surat Ijin Layanan Kesehatan



Dari grafik 3.13 dapat diketahui jumlah pengajuan sertifikat/surat ijin yang paling banyak dari tahun 2015 sampai 2018 yaitu sertifikat laik terbang dan yang kedua yaitu surat ijin angkut jenazah.

Pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 tidak terdapat indikator tersebut, namun indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan yang diterbitkan dapat mendukung pencapaian indikator persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson.



Capaian indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan yang diterbitkan KKP Kelas I Soekarno Hatta pada tahun 2018 sebesar 156,4% lebih besar dibandingkan KKP Kelas I Denpasar yaitu 122%. Hal ini dikarenakan banyaknya pengajuan sertifikat ICV masyarakat umum dan pengajuan buku ICV dari klinik swasta di KKP Soetta. Jumlah ICV yang diterbitkan di KKP Soetta sebanyak 139.210 sertifikat, sedangkan di KKP Denpasar sebanyak 6.881 sertifikat.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena adanya Permenkes No.23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dan Perdirjen P2P No. SR.03.04/II/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional sehingga mendorong peningkatan jumlah pelayanan vaksinasi kepada masyarakat oleh klinik/ rumah sakit.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk bisa mencapai target dalam pelayanan penerbitan dokumen kesehatan yaitu perbaikan alur pelayanan terutama dalam penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV), perubahan mekanisme penerbitan dokumen kesehatan dari manual menjadi online melalui aplikasi Simkespel serta melakukan visitasi dan verifikasi terhadap klinik/ rumah sakit yang mengajukan permohonan pelayanan vaksinasi dan menerbitkan sertifikat bagi klinik/ rumah sakit yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pelayanan vaksinasi.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- a. Masih belum tersosialisasinya alur dan persyaratan penerbitan dokumen kesehatan.
- b. Jaringan internet yang belum stabil, serta server website yang belum adekuat.



7. Pemecahan Masalah

Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, penyelenggara, dan pengguna jasa bandara yang akan mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan serta koordinasi dengan unit lain terkait penyediaan jaringan internet yang stabil dan server website untuk memudahkan penerbitan dokumen kesehatan secara online.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp. 23.100.000,-
- b. Pengadaan bahan kekarantinaan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp. 333.609.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Pelayanan penerbitan dokumen kesehatan melibatkan tenaga dokter, perawat dan tenaga administrasi yang terlatih.
- d. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 347.875.561,- atau 99,5% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 349.689.000,- dengan capaian kinerja sebesar 156,4%.



INDIKATOR 7

Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi

1. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan. Target pada tahun 2018 yaitu 2 bandara. Outcome dari indikator ini yaitu terlaksananya bandara yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan kriteria sebagai berikut :

a. *Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Berkriteria Baik*

Lingkungan Bandara Soekarno Hatta Tempat-Tempat Umum (TTU) yang dinilai sanitasinya berupa sarana dan bangunan umum. Sarana dan bangunan di Bandara Soekarno Hatta meliputi Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Cargo dan Hotel Bandara yang terdiri dari 110 area Sedangkan di Bandara Halim Perdana Kusuma terdapat 15 area. TTU berkriteria baik jika 100% hasil inspeksi Sanitasi Lingkungan berdasarkan Kepmenkes no. 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum minimal memperoleh nilai ≥ 75 dan jika terdapat temuan segera ditindaklanjuti.

b. *Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan*

Tempat pengelolaan Makanan (TPM) di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma meliputi Restoran/Rumah Makan dan Jasa Boga / Catering yang menyediakan makanan di pesawat. Pengawasan TPM dilaksanakan berdasarkan Permenkes No. 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga dan Permenkes No. 1098/MENKES/PER/VI/2003 tentang persyaratan higiene sanitasi rumah makan dan restoran. Dikategorikan memenuhi syarat kesehatan jika 95% restoran/rumah makan dan Jasa Boga yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan atau berdasarkan inspeksi sanitasi memperoleh nilai minimal 700

c. *Tempat Penyediaan Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan*

Penilaian tempat-tempat penyediaan air bersih didasarkan Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum



dan Permenkes No. 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata laksana pengawasan kualitas air minum. Tempat penyedia air bersih/minum dikatakan memenuhi syarat kesehatan jika 80 % sarana air minum yang berada di wilayah bandara memiliki sertifikat dan atau memenuhi persyaratan kualitas fisika kimia dan mikrobiologi air minum sesuai persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut diatas.

2. Cara Perhitungan Kriteria Bandara Sehat di Bandara Soekarno Hatta dan Halim PK

Untuk mengetahui suatu Bandara memenuhi kriteria sesuai definisi operasional diatas, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

- o *Tempat-Tempat Umum (TTU) Berkriteria Baik*

$$\frac{\text{Hasil IKL TTU yang berkriteria baik}}{\text{Target 100\% TTU}} \times 100 \%$$

- o *Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan*

$$\frac{\text{TPM bersertifikasi + Hasil IKL TPM yang memenuhi syarat}}{\text{Target 95\% TPM}} \times 100 \%$$

- o *Tempat Penyediaan Air Bersih memenuhi Syarat Kesehatan*

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Air yang memenuhi syarat}}{\text{Target 80\% Sarana Air Berih}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3
Hasil Inspeksi Sanitasi Tahun 2018

NO	Hasil Inspeksi Sanitasi	Kriteria	SOETTA			HALIM		
			Target	Jml	%	Target	Jml	%
1.	TTU berkriteria baik	100%	110	110	100%	15	15	100%
2.	TPM Memenuhi Laik Hygiene	95%	276	263	95,2%	59	56	95%
3.	Tempat Penyediaan Air Minum memenuhi syarat kesehatan	80%	84	80	95,2%	11	10	90,9%

Dari ketiga data diatas menunjukkan bahwa TTU, TPM, dan penyediaan air di bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma memenuhi persyaratan kesehatan sesuai yang ditargetkan. Dengan demikian perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- **Realisasi**

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laiq hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

- 1) Bandara Soekarno-Hatta
- 2) Bandara Halim Perdanakusuma

- **Capaian**

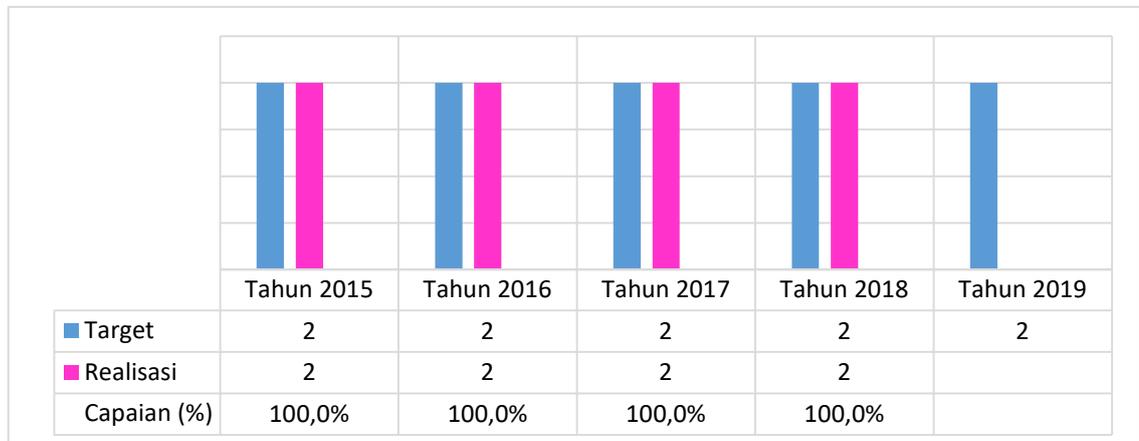
$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{2 \text{ bandara}}{2 \text{ bandara}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

2. Capaian Kinerja

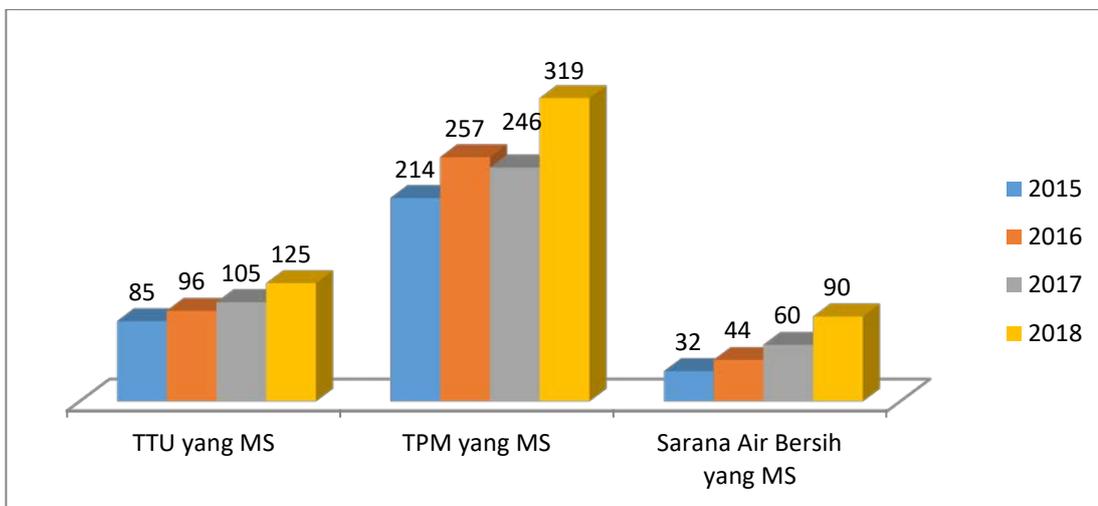
Pada tahun 2018, dua wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma memenuhi syarat-syarat sanitasi. Sehingga capaian pada tahun 2018 sebesar 100%.

Grafik 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi



Dari grafik diatas diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah bandara yang memenuhi syarat sanitasi sebanyak 2 bandara dan sudah mencapai target dengan capaian 100% setiap tahunnya.

Grafik 3.15
Perbandingan Jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Sarana Penyediaan Air Bersih yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 - 2018



Berdasarkan grafik 3.15 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan meningkat setiap tahun. Dimana adanya beberapa pembangunan di Bandara Soetta dan Halim seperti perluasan terminal 3, stasiun kereta dan hotel yang menambah lokasi pengawasan KKP Kelas I Soekarno Hatta setiap tahunnya.
- Pada tahun 2016 jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan meningkat dibanding tahun 2015 karena pada tahun 2016 dilakukan beberapa upaya yaitu sosialisasi, kesepakatan bersama, dan pelatihan hygiene sanitasi kepada penjamah makanan dan pengusaha makanan sabnayak 2 kali. Namun pada tahun 2017 jumlahnya kembali menurun karena banyak TPM yang tutup dampak pembangunan terminal 3 lama menjadi terminal internasional. Tahun 2018 meningkat kembali dikarenakan telah dilakukan beberapa upaya yaitu pemasangan plakat mutu dan akhir tahun 2018 KKP Kelas I Soekarno Hatta memberikan surat teguran kepada TPM yang tidak memiliki sertifikat untuk meningkatkan jumlah TPM yang memenuhi syarat pada tahun 2019.
- Pada tahun 2015 jumlah sarana yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 32 sarana, hal ini berdasarkan hasil uji petik terhadap sarana air yang tidak mengajukan penerbitan sertifikat. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018 jumlah sarana air bersih yang memenuhi syarat meningkat

setiap tahunnya karena adanya penambahan sarana air berupa drinking water di terminal 3 internasional dan sarana air untuk pesawat di apron terminal 3 yaitu Ground Support System (GSS) Portable Water sebanyak 36 lokasi.

Target indikator Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 100%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 2 bandara atau 100%, telah menyumbang pencapaian target Renstra dan RAP.



Capaian indikator Pelabuhan/Bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 sama dengan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena selalu dilakukan pembinaan dan upaya perbaikan berupa saran dan rekomendasi untuk memperbaiki kondisi sanitasi sarana TTU, TPM dan tempat penyediaan air mium yang tidak memenuhi syarat. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan sosialisasi, rapat koordinasi lintas sektor dan upaya kesepakatan bersama demi mewujudkan bandara sehat.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melaksanakan Pertemuan Evaluasi Laik Higiene Sanitasi Restoran / Rumah Makan di Bandara Soetta dan Halim PK pada tanggal 27 Maret 2018;

- b. Membuka pekan sertifikasi laik higiene sanitasi bagi rumah makan dan restoran yang belum bersertifikat pada bulan April dan Desember 2018;
- c. Pemasangan plakat tingkat mutu laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan pada bulan Mei 2018. Pemasangan plakat berupa simbol simbol tersenyum lebar berwarna hijau bagi yang memiliki sertifikat, tersenyum datar berwarna kuning bagi yang tidak memiliki sertifikat tetapi hasil IKL memenuhi syarat dan simbol sedih berwarna merah bagi yang tidak memiliki sertifikat dan hasil IKL tidak memenuhi syarat;
- d. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas higiene sanitasi pangan bagi penjamah tempat pengelolaan pangan dalam rangka asian games 2018. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2018 dengan anggaran bersumber dari Subdit HSP Direktorat Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI bekerja sama dengan bagian *comercil* PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Soekarno Hatta;
- e. Memberikan surat teguran kepada TPM yang sampai dengan bulan desember 2018 tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi;
- f. Untuk meningkatkan cakupan sarana air minum yang memenuhi syarat melalui pemberian saran perbaikan kualitas berupa surat rekomendasi dan laporan hasil pengujian sampel air kepada para penyelenggara air.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Kendala Eksternal :

- a. Kurangnya kesadaran dan ketaatan dari pemilik atau penyelenggara TPM akan pentingnya kepemilikan sertifikat dan penyelenggaraan TPM yang sesuai persyaratan higiene sanitasi;
- b. Persyaratan administrasi yang diajukan oleh penyelenggara TPM tidak lengkap. Karena tidak semua TPM memiliki penanggungjawab dan penjamah makanan yang telah mengikuti kursus/pelatihan higiene sanitasi pengelolaan makanan;
- c. Penyelenggara TPM tidak rutin melakukan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan dalam hal ini *rectal swab*, sebagai salah satu syarat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat;

- d. Masih terdapat sarana air minum yang belum melakukan pengujian kualitas sampel air secara periodik karena tidak ada keharusan memiliki sertifikat;

Kendala Internal :

- a. Banyaknya jumlah TPM di Bandara Soekarno Hatta tidak sebanding dengan SDM yang ada di bidang PRL khususnya Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan;
- b. Alokasi anggaran kegiatan untuk mendukung Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan sangat minim tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dilakukan pengawasan dan beban kerja yang ada;
- c. Semua TPM dan Tempat Penyedia Air Minum yang berada di bandara Soekarno Hatta belum melakukan pengawasan internal sehingga pengawasan tersebut masih menjadi beban kerja KKP soekarno Hatta;
- d. Tenan /TPM terlalu cepat berganti (tutup dan atau buka baru) menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

7. Pemecahan Masalah

Eksternal :

- a. Perlunya aturan yang lebih mengikat tentang keharusan dan sanksi terkait kewajiban penyelenggaraan pengelolaan makanan dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan, terutama di bandara sebagai pintu masuk negara;
- b. Meningkatkan upaya penyelenggaraan kursus/pelatihan higiene sanitasi makanan bagi pemilik/penanggungjawab dan penjamah makanan di bandara ataupun wilayah dinas kesehatan setempat;
- c. Meningkatkan upaya sosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi penjamah makanan untuk menghindari terjadinya *outbreak* keracunan makanan;
- d. Perlunya penambahan pasal dalam peraturan menteri terkait pengawasan air minum tentang pentingnya kepemilikan sertifikat air minum untuk kebutuhan pesawat;

Internal :

- a. Penambahan SDM terutama tenaga teknis di bidang kesehatan lingkungan yang benar-benar ditempatkan dan bekerja di bidang



- Pengendalian Risiko Lingkungan. Jika tidak ada penambahan SDM maka perlu penambahan jam kerja atau hari kerja;
- b. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang berasal dari direktorat kesehatan lingkungan yang melibatkan KKP Soekarno Hatta untuk mengatasi keterbatasan anggaran dari direktorat SKK;
 - c. Pembuatan SOP tentang sistem pengawasan internal yang lebih efektif dan efisien bagi penyelenggara TPM, penyedia air minum dan penanggungjawab sarana TTU untuk meringankan fungsi pengawasan oleh KKP;
 - d. Menyarankan kepada otoritas dan pengelola bandara agar memberikan sosialisasi kepada tenan khususnya penyelenggara TPM agar segera mendaftarkan usahanya kepada KKP paling lambat 3 bulan setelah beroperasi.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dengan alokasi anggaran Rp. 185.430.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Dalam rangka efisiensi SDM, dilakukan upaya perbantuan (*sharing*) tenaga teknis dalam hal ini tenaga entomolog yang ada di bidang PRL dapat membantu melakukan pekerjaan di Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan;
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran, dilakukan upaya diseminasi informasi terkait temuan di lapangan berkaitan dengan kondisi yang tidak memenuhi syarat sanitasi. Diseminasi ini disampaikan pada pertemuan lintas sektor yang anggaran pelaksanaannya dibebankan dari kegiatan Direktorat P2PTVZ. Hal ini dapat dilakukan karena kondisi sanitasi lingkungan sangat erat kaitannya dengan timbulnya keberadaan vektor di lingkungan bandara.
- c. Target subindikator tempat penyediaan air bersih melebihi target yaitu sebesar 118,4%. Hal ini didukung karena keberhasilan KKP Soekarno Hatta dalam mensosialisasikan pentingnya pengawasan internal setiap



bulan dengan pembiayaan dari penyelenggara air. Walaupun dalam pelaksanaan pengawasan masih dibantu oleh KKP Soekarno Hatta dalam pengambilan sampel, pengiriman ke laboratorium, analisa hasil uji dan pemberian saran rekomendasi.

- d. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 175.411.000,- atau 94,6% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 185.430.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



INDIKATOR 8

Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter Dan Buffer Area

1. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6. Target pada tahun 2018 yaitu 2 bandara. Nilai standar nasional yang dipakai yaitu SOP Nasional Kegiatan KKP di pintu masukan Negara. Outcome dari indikator ini yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.

2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area

- 1) Bandara Soekarno-Hatta
- 2) Bandara Halim Perdanakusuma

- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{2 \text{ bandara}}{2 \text{ bandara}} \times 100 \% = 100\%$$

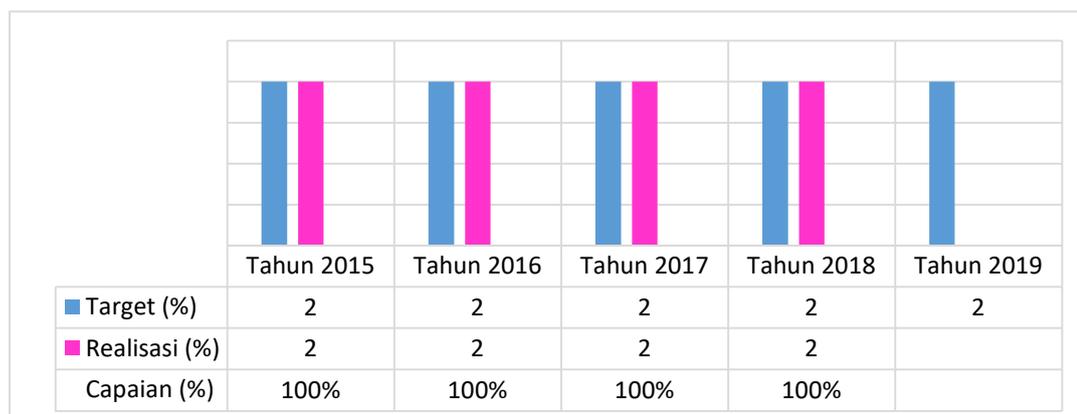
3. Capaian Kinerja

Pada tahun 2018, dua wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Pengamatan Vektor Tahun 2018

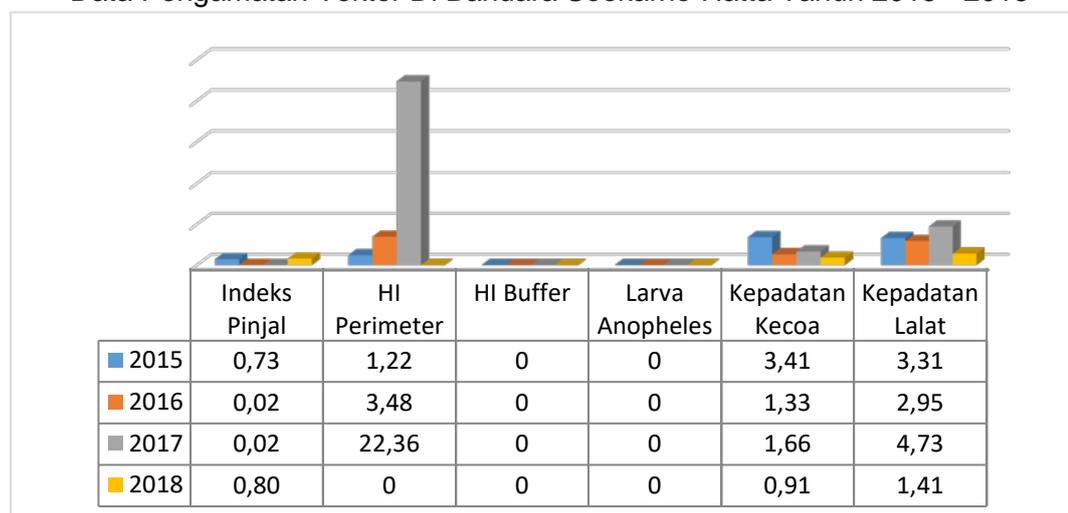
No.	Hasil Pemantauan Vektor	Standar Nasional	Wilayah Kerja		Ket.
			Bandara Soetta	Bandara Halim Pk	
1.	Indeks Pinjal	<1	0,796	0,253	Memenuhi kriteria
2.	HI Perimeter	0	0	0	Memenuhi kriteria
3.	HI buffer	<1	<1	<1	Memenuhi kriteria
4.	Larva Anopheles	<1	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Memenuhi kriteria
5.	Kepadatan Kecoa	Rendah	Rendah	Rendah	Memenuhi kriteria
6.	Kepadatan Lalat	<6	1,408	2,27	Memenuhi kriteria

Grafik 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD
Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area



Dari grafik diatas diketahui bahwa setiap tahun jumlah bandara yang bebas vektor sebanyak 2 bandara dan sudah mencapai target dengan capaian 100% setiap tahunnya. Capaian tersebut adalah capaian maksimal yang dapat diperoleh karena dengan target dua bandara yang bebas vektor pada area wilayah perimeter dan buffer area sudah mencakup seluruh wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno Hatta yakni Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

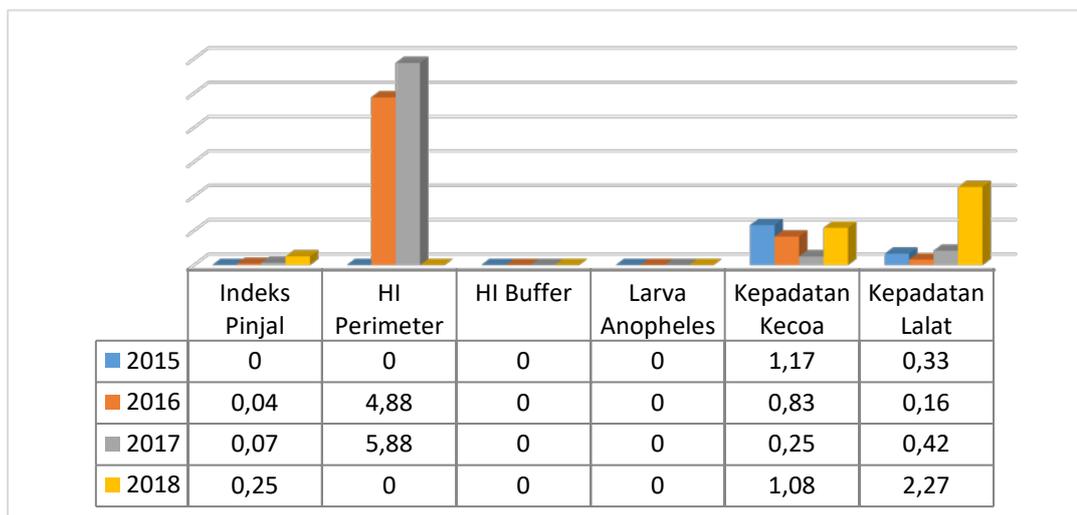
Grafik 3.17
Data Pengamatan Vektor Di Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2015 - 2018



Dari grafik 3.17 trend indeks pinjal, HI perimeter, HI Buffer, Larva anopheles, kepadatan kecoa dan lalat sebagian besar setiap tahun mengalami penurunan kecuali pada HI perimeter, hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan sanitasi lingkungan. Dengan kondisi sanitasi yang baik dapat menurunkan tingkat kepadatan vektor. Kepadatan vektor di

Bandara Soekarno - Hatta masih memenuhi standar. Sedangkan larva anopheles dari tahun 2015 sampai 2018 belum pernah ditemukan larva maupun nyamuk dewasa.

Grafik 3.18
Data Pengamatan Vektor Di Bandara Halim Perdanakusuma Tahun 2015 - 2018



Dari grafik 3.18 trend indeks pinjal, HI perimeter, HI Buffer, Larva anopheles, kepadatan kecoa dan lalat setiap tahun mengalami penurunan kecuali pada HI perimeter, hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan sanitasi lingkungan. Dengan kondisi sanitasi yang baik bisa menurunkan tingkat kepadatan vektor. Kepadatan vektor di Bandara Halim Perdanakusuma masih memenuhi standar. Sedangkan larva anopheles dari tahun 2015 sampai 2018 belum pernah ditemukan larva maupun nyamuk dewasa.

Target indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 100%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 2 bandara atau 100%, telah menyumbang pencapaian target Renstra dan RAP.



Capaian indikator jumlah pelabuhan/bandara/plbd bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 sama dengan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan lintas program baik pemerintah, BUMN maupun swasta di lingkungan Bandara Soekarno Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma. Koordinasi dan kerjasama ini seperti dengan memberdayakan kader dan penguatan program dengan dukungan pembiayaan dari berbagai lintas sektor tersebut.

Selain itu dengan adanya alokasi dana terkait pencegahan dan pengendalian vektor, maka bahan dan peralatan untuk kegiatan tersedia dengan cukup. Sumber daya manusia di lingkungan KKP Kelas I Soekarno Hatta juga telah mengikuti beberapa pelatihan guna meningkatkan kapasitasnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian vektor. KKP Kelas I Soekarno Hatta juga memfasilitasi dua kali pertemuan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas program di bandara. Dalam pertemuan tersebut dapat dilihat bahwa program pencegahan dan pengendalian vektor dan BPP juga didukung oleh pimpinan-pimpinan di lintas sektor baik pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta di lingkungan seperti perusahaan penerbangan, katering, groundhandling dan sebagainya.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan selama tahun 2018 untuk mencapai target indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan alokasi anggaran dalam DIPA KKP Kelas I Soekarno Hatta
- b. Penyediaan bahan dan peralatan yang memadai
- c. Diseminasi hasil pengamatan kepada lintas sektor dan program terkait
- d. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas program di bandara, termasuk dalam pemberdayaan kader
- e. Konsultasi teknis dan koordinasi dengan pusat dan lintas sektor
- f. Bimbingan teknis ke wilayah kerja



- g. Peningkatan kapasitas SDM dalam teknik pencegahan dan pengendalian vektor dan BPP
- h. Mengawal deklarasi bersama pengendalian vektor terpadu dengan lintas program/lintas sektor di bandara

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Berikut adalah beberapa kendala/masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator bandara yang bebas vektor di wilayah perimeter dan buffer area, meliputi :

- a. Terdapat beberapa kader yang kurang proaktif dan disiplin, khususnya dalam hal pelaporan
- b. Tingkat kepadatan vektor tertentu di beberapa titik sempit tinggi
- c. Terdapat kondisi lingkungan yang menjadi tempat perkembangbiakan vektor

7. Pemecahan Masalah

Beberapa kendala/permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan upaya sebagai berikut :

- a. Tetap berkomunikasi dan koordinasi dengan kader agar meningkatkan keaktifan, kinerja dan disiplinnya
- b. Melakukan upaya pengendalian di titik-titik dimana kepadatan vektornya tinggi hingga tingkat kepadatannya menjadi rendah sehingga tidak berpotensi menimbulkan penularan penyakit akibat vektor
- c. Berkoordinasi dengan pihak pengelola lingkungan dimaksud serta memberikan rekomendasi intervensi lingkungan yang diperlukan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor.

Seluruh kendala/masalah yang ditemukan di lapangan juga dibahas saat pertemuan penguatan jejaring dan koordinasi dengan lintas sektor / lintas program di bandara.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik dengan alokasi anggaran Rp. 1.316.119.457,- terdiri dari :



- a. Pengamatan Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Malaria, berupa survei larva *Anopheles sp.* di tempat-tempat yang diduga sebagai perindukan nyamuk seperti danau atau rawa. Hasilnya selama tahun 2018 tidak ditemukan larva *Anopheles* baik di Bandara Soekarno Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma sesuai dengan kriteria indikator di atas.
- b. Survei Demam Massal Malaria Terpadu di Lingkungan Pelabuhan dan Bandara (KKP)
- c. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, termasuk Malaria Cross Border
- d. Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria
- e. Surveilans Vektor (*Aedes*, *Anopheles*, Pinjal dan Lalat), kegiatan ini mencakup pemetaan awal vektor *Aedes sp* dan survei vektor *Aedes* oleh kader/Petugas Pemantau Jentik Bandara. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh kader menjadi salah satu bahan untuk menghitung House Index (HI) yang merupakan salah satu kriteria pencapaian indikator di atas.
- f. Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida
- g. Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)
- h. Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di Wilayah Kerja KKP
Adapun kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah penguatan jejaring kemitraan dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program di bandara serta pengawasan terhadap kegiatan Badan Usaha Swasta yang bergerak di bidang *pest control* yang beroperasi di wilayah bandara.
- i. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Program Pengendalian Vektor & BPP di KKP. Kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan konsultasi teknis dan koordinasi serta bimbingan teknis ke wilayah kerja.
- j. Layanan Pengendalian Vektor DBD. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang indikator pada output ini adalah mulai dari survei vektor *Aedes* hingga pengendaliannya.

- k. Layanan Pengendalian Vektor Pes. Kegiatan ini mencakup surveilans vektor pes melalui pemasangan perangkap tikus hingga identifikasi tikus tertangkap beserta pinjalnya. Hasil kegiatan ini yakni Indeks Pinjal dimana kriteria pencapaian indikator harus ≤ 1 .
- l. Layanan Pengendalian Vektor Diare
Kegiatan ini meliputi survei vektor diare terhadap vektor lalat dan kecoa serta upaya pengendaliannya. Apabila hasil survei ditemukan kepadatan lalat maupun kecoa yang tinggi, maka dilakukan intervensi baik pengendalian secara kimia melalui baiting/spraying maupun perbaikan kondisi lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menekan kepadatan lalat/kecoa serendah mungkin sehingga tidak berpotensi menimbulkan penyebaran penyakit akibat vektor. Kegiatan ini mendukung capaian indikator dengan kriteria angka kepadatan lalat < 6 dan kepadatan kecoa rendah.

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target indikator ini, KKP Kelas I Soekarno Hatta telah berupaya menggunakan sumber daya seefisien mungkin diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan teknis dan dukungan teknis dalam rangka pencegahan dan pengendalian vektor dan BPP di bandara.
- b. Besaran yang ada dalam pengalokasian sesuai dengan Standar Biaya Masukan TA 2018.
- c. Melibatkan SDM terampil di bidang pencegahan dan pengendalian vektor yakni entomolog kesehatan dan sanitarian.
- d. Memberdayakan kader dalam kegiatan di lapangan.
- e. Membangun sinergi dengan lintas sektor di bandara untuk saling memperkuat program dengan menggunakan masing-masing sumber daya yang ada di instansinya. Termasuk memonitor kegiatan Badan Usaha Swasta Pest Control yang beroperasi di bandara.
- f. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 1.029.581.361,- atau 97,8% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 179.200.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



INDIKATOR 9

Jumlah Orang yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung

1. Definisi Operasional

Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya. Skrining untuk pengendalian penyakit adalah pemeriksaan orang-orang asimtomatik untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit (as likely or unlikely to have disease). Target pada tahun 2018 yaitu 1.000 orang. Outcome dari indikator ini yaitu terdeteksinya faktor risiko penyakit menular (HIV AIDS dan TB) pada masyarakat di wilayah layanan KKP sehingga dapat meminimalisir faktor risiko penyakit menular.

2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun

- Pemeriksaan TB = 601 orang
- Pemeriksaan HIV/AIDS = 695 orang
- JUMLAH = 1.296 orang**

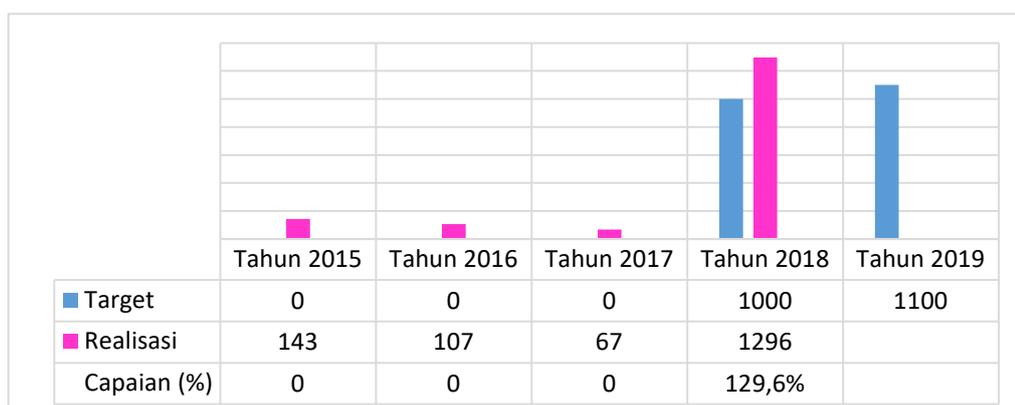
- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{1.296 \text{ orang}}{1.000 \text{ orang}} \times 100\% = \mathbf{129,6\%}$$

3. Capaian Kinerja

Grafik 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Jumlah Orang Yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung

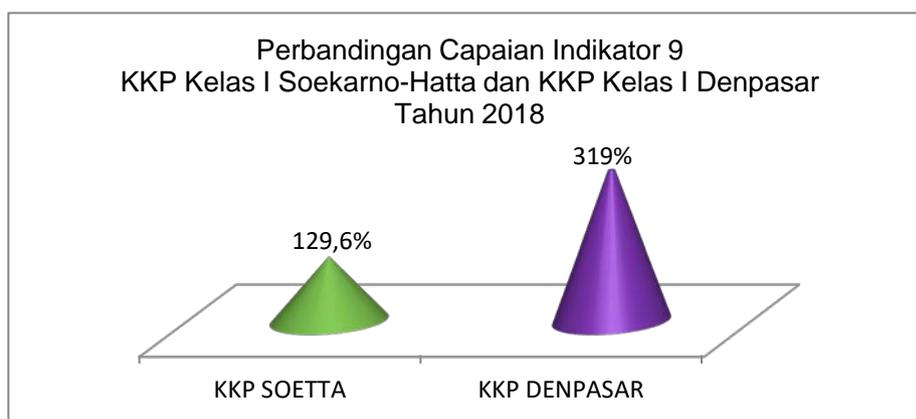


Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung pada tahun 2018 sebanyak 1.296 orang dan sudah mencapai target dengan capaian sebesar 129,6 %. Realisasi pada tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2015 hingga tahun 2017, dimana tahun 2015 hingga tahun 2017 hanya dilakukan pemeriksaan TB dan tidak ditetapkan target pemeriksaannya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Data screening penyakit menular pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Skrining Penyakit Menular Langsung Tahun 2018

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	
		Positif (+)	Negatif (-)
1.	TB	1	600
2.	HIV AIDS	1	694
Total		2	1.294

Target indikator persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 100%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 1.296 orang telah menyumbang pencapaian target RAP.



Capaian indikator persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung KKP Kelas I Soekarno Hatta pada tahun 2018 sebesar 129,6%, lebih kecil dibandingkan KKP Kelas I Denpasar yaitu 319%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena adanya pembentukan Pokja HIV dan pelayanan mobile VCT dan TB ke instansi/ BUMN/ Perusahaan swasta yang ada di wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Capaian indikator meningkat dari tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya screening TB hanya dilakukan khusus bagi Calon jamaah haji.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyakit menular langsung (HIV dan TB) KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah melakukan sosialisasi program Pokja HIV, pembentukan Pokja HIV dan sosialisasi tentang penyakit HIV dan TB serta screening penyakit tersebut.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi dalam pencapaian target indikator screening penyakit menular (HIV dan TB) adalah masih adanya stigma terhadap penderita HIV/ AIDS sehingga masih ada instansi yang belum berkenan untuk dilakukan screening pemeriksaan HIV dan TB di unit kerjanya.

7. Pemecahan Masalah

Melakukan sosialisasi atau kampanye guna mencapai tiga indikator kebijakan *global getting to zeroes* yaitu: Tidak ada penambahan kasus HIV/AIDS, tidak ada angka kematian karena HIV/ AIDS dan tidak ada diskriminasi bagi penderita HIV/ AIDS

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.200.000,-
- b. Layanan pengendalian penyakit TB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Kegiatan Screening penyakit menular (HIV dan TB) melibatkan tenaga baik staf bidang UKLW maupun staf dari instansi lain terutama dalam pembentukan Pokja HIV. Hal sangat menunjang dalam pencapaian target pemeriksaan screening HIV dan TB.
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 172.230.000,- atau 96,1% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 179.200.000,- dengan capaian kinerja sebesar 129,6%.



INDIKATOR 10

Jumlah Wilayah Kerja yang Melaksanakan Posbindu

1. Definisi Operasional

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan posbindu. Kegiatan Posbindu dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta, guna memantau perkembangan kesehatan karyawan di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga tercapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Outcome dari indikator ini yaitu terdeteksinya faktor risiko penyakit tidak menular pada masyarakat di wilayah layanan KKP sehingga dapat meminimalisir faktor risiko penyakit tidak menular.

2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu dalam satu tahun

- 1) Lapangan Bandara Soetta
- 2) Kantor Imigrasi Bandara Soetta
- 3) PT. Gapura Angkasa

- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{3 \text{ lokasi}}{1 \text{ lokasi}} \times 100\% = 300\%$$

3. Capaian Kinerja

Grafik 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Jumlah Wilayah Kerja yang Melaksanakan Posbindu



Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah realisasi Posbindu pada tahun 2018 sebanyak 3 lokasi dan sudah mencapai target dengan capaian 300%. Realisasi Posbindu tahun 2018 lebih kecil dari tahun 2016 dan 2017, dikarenakan menurunnya alokasi anggaran untuk kegiatan ini. Hasil pelaksanaan Posbindu pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Hasil Pelaksanaan Posbindu Tahun 2018

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Orang
1.	28 Juni 2018	Lapangan Bola Bandara Soekarno-Hatta	153
2.	02 Agustus 2018	Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta	68
3.	27 November 2018	Kantor PT. Gapura Angkasa	53
Total			274

Target indikator jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 30%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 3 lokasi, hal ini menyumbang pencapaian target RAP.



Capaian KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 pada indikator jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu sebesar 300%, lebih besar dibandingkan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena pelaksanaan kegiatan dilakukan bersamaan dengan kegiatan skrining penyakit menular (HIV dan TB). Sediaan reagent menggunakan sisa reagent tahun 2018.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah melakukan upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dengan melakukan pemeriksaan fisik (pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, BMI, tekanan darah, nadi, pernafasan) konsultasi kesehatan dan pemeriksaan pendukung (GDS, Kolesterol)

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang menjadi permasalahan utama adalah tidak adanya dukungan dana dari Subdit Penyakit Tidak Menular (PTM), sehingga pelaksanaan deteksi dini tidak bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan sediaan reagen.

7. Pemecahan Masalah

Menyiapkan anggaran untuk ketersediaan reagen guna pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, dikarenakan dalam event tertentu ada beberapa instansi yang meminta KKP Kelas I Soekarno-Hatta untuk melakukan pemeriksaan tersebut

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu skrining penyakit menular.

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Sumber daya yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tenaga dokter, perawat, analis laboratorium dan petugas administrasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain yaitu skrining penyakit menular.
- b. Kegiatan juga melibatkan instansi lain dalam pelaksanaannya yaitu Polres Bandara Soekarno-Hatta, Bhangkari dan BPJS Kesehatan dalam rangka HUT Bhayangkari.
- c. Kegiatan Posbindu tidak ada alokasi anggarannya, namun dapat terlaksana dimana kegiatan Posbindu dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan screening penyakit menular.



INDIKATOR 11

Jumlah Tempat Kerja Yang Melaksanakan Implementasi KTR Di Wilayah Kerja KKP

1. Definisi Operasional

Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah kerja KKP. Outcome dari indikator ini yaitu tersedianya kawasan yang bebas asap rokok di wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

2. Cara Perhitungan

$$\frac{\text{Akumulasi jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Tempat Kerja yang Ditargetkan Mengimplementasikan KTR}} \times 100 \%$$

$$\frac{9 \text{ lokasi}}{5 \text{ lokasi}} \times 100 \% = 180 \%$$

• Realisasi

Akumulasi jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP dalam satu tahun yaitu:

- 1) Kantor Induk KKP Kelas I Soekarno-Hatta
- 2) Wilayah kerja Halim Perdana Kusuma Jakarta
- 3) Pos Pelayanan Terminal 1 A
- 4) Pos Pelayanan Terminal 1 B
- 5) Pos Pelayanan Terminal 1 C
- 6) Pos Pelayanan Terminal 2 D
- 7) Pos Pelayanan Terminal 2 F
- 8) Pos Pelayanan Terminal 3 Internasional
- 9) Pos Pelayanan Terminal 3 Domestik

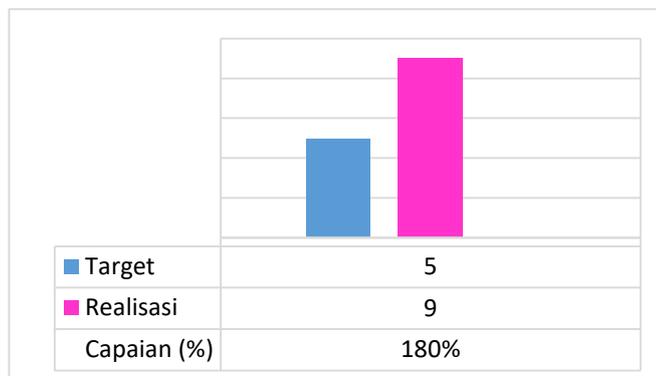
• Capaian

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{9 \text{ lokasi}}{5 \text{ lokasi}} \times 100 \% = \mathbf{180 \%}$$

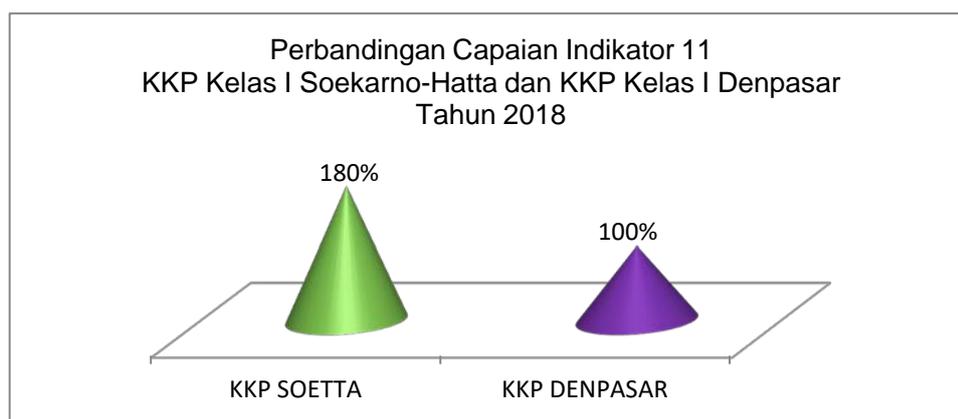
3. Capaian Kinerja

Grafik 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Tempat Kerja
Yang Melaksanakan Implementasi KTR Di Wilayah Kerja KKP Tahun 2018



Pada tahun 2018 jumlah tempat kerja di wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta yang melaksanakan implementasi KTR sebanyak 9 lokasi dan sudah mencapai target dengan sehingga capaian sebesar 180 %. Realisasi dan capaian tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, karena merupakan indikator baru, dan pada tahun 2019 tidak lagi ditetapkan target dari indikator tersebut.

Target indikator jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 30%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 9 lokasi, hal ini menyumbang pencapaian target RAP.



Capaian KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 pada jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP sebesar 180%, lebih besar dibandingkan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena kegiatan Kawasan Tanpa Asap Rokok sejalan dengan program dari Bandara Soekarno-Hatta, sehingga bisa dapat bersinergi dalam mewujudkan Bandara sehat bebas asap rokok.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu dengan melakukan promosi dan edukasi tentang bahaya rokok baik bagi perokok aktif maupun pasif melalui pemasangan banner, spanduk dan stiker.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Kegiatan ini terkendala karena tidak adanya anggaran khusus yang menunjang kegiatan ini, sehingga mengalami keterbatasan dalam produksi banner, spanduk dan stiker.

7. Pemecahan Masalah

Dilakukan edukasi dengan pemasangan videotron, agar area pemasangan kawasan tanpa rokok di wilayah kerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta dapat diperluas.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu program Bandara Sehat.

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk kegiatan Kawasan Tanpa Rokok, namun kegiatannya dapat terlaksana melalui pemanfaatan media KIE dan kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II dalam mewujudkan bandara sehat serta promosi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok.

INDIKATOR 12

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

1. Definisi Operasional

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBPN, Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e monev Bappenas, LEB dalam periode satu tahun. Target tahun 2018 yaitu 40 dokumen. Outcome dari indikator ini yaitu terpenuhinya dokumen dukungan manajemen dengan tepat waktu dan akurat.

2. Cara Perhitungan

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah dokumen dukungan manajemen yang disusun dalam waktu satu tahun

No	Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Dokumen RKAKL/DIPA	2	Awal dan revisi
2	Laporan Tahunan	1	
3	Laporan Keuangan	2	Semester I & II
4	Laporan BMN	2	Semester I & II
5	Laporan Kinerja	1	
6	Profil	1	
7	Proposal PNBPN	1	
8	Dokumen kepegawaian	2	Kontrak & Penilaian
9	Laporan e monev DJA	12	Setiap Bulan
10	Laporan e monev Bappenas	4	Setiap Triwulan
11	Laporan Eksekutif Bulanan (LEB)	12	Setiap Bulan
Total		40	

- **Capaian**

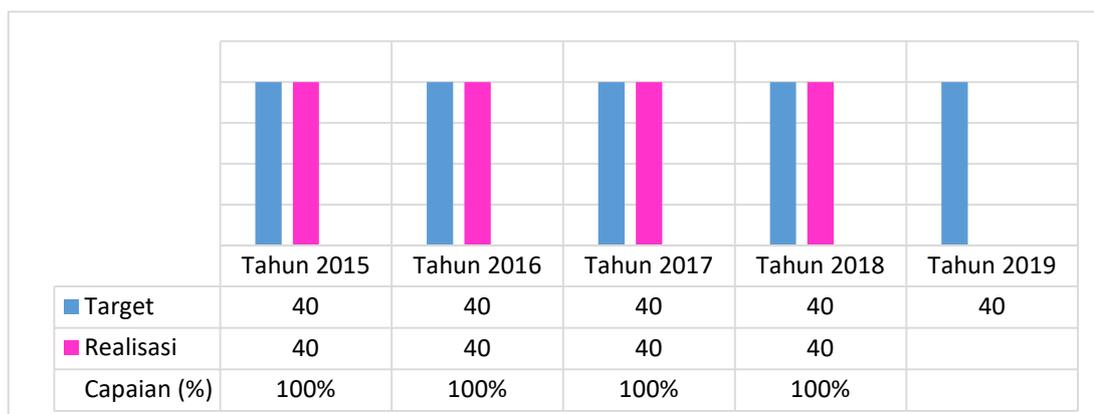
$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{40 \text{ dokumen}}{40 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100\%$$



3. Capaian Kinerja

Grafik 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya



Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah dokumen dukungan manajemen yang dihasilkan pada tahun 2018 sebanyak 40 dokumen dan sudah sesuai target dengan capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2015 hingga tahun 2018 selalu mencapai target dan dengan capaian yang tetap setiap tahun yaitu 100%.

Target indikator persentase laporan program ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 90%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 40 dokumen, hal ini menyumbang pencapaian target RAP.



Capaian indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 sama dengan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena terdapat SDM petugas laporan, terdapat sarana yang memadai untuk menyusun laporan seperti komputer, printer, dan terdapat alokasi anggaran untuk pertemuan penyusunan laporan. Selain itu setiap bulan rutin dilakukan penyusunan laporan dan adanya dukungan dari masing-masing bidang untuk menyampaikan data laporan.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Membuat kesepakatan dan nota dinas tenggang waktu pengumpulan laporan.
- b. Membuat SOP pengumpulan data.
- c. Koordinasi dan rekonsiliasi data dengan bidang-bidang sebagai sumber data primer.
- d. Rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN setiap bulan.
- e. Review Laporan Keuangan dan BMN setiap semester.
- f. Koordinasi pelaporan dengan unit utama eselon I.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Keterlambatan pengumpulan data dan laporan dari masing-masing bidang yang dapat menghambat penyusunan dan finalisasi laporan. Salah satu penyebabnya yaitu ada beberapa data laporan yang bersumber dari poliklinik non KKP dan seringkali terlambat mengumpulkan data.

7. Pemecahan Masalah

- a. Membuat Surat Keputusan Kepala Kantor perihal penanggung jawab setiap jenis laporan pada masing-masing bidang beserta uraian tugas.
- b. Pemberian reward dan punishment kepada bidang.
- c. Membuat mekanisme pengumpulan data dari poliklinik non kkp yang mudah, cepat, dan tepat.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Penyusunan rencana program dengan alokasi anggaran Rp. 91.602.000,-
- b. Penyusunan rencana anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 421.025.000,-
- c. Pelaksanaan pemantauan&informasi dengan alokasi anggaran Rp. 258.401.000
- d. Pelaksanaan laporan keuangan dengan alokasi anggaran Rp. 136.692.000,-
- e. Pengelolaan perbendaharaan dengan alokasi anggaran Rp. 40.250.000,-
- f. Pengelolaan kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp.63.584.000,-
- g. Pelayanan umum dan perlengkapan dengan alokasi anggaran Rp. 7.560.000
- h. Pelayanan humas dengan alokasi anggaran Rp. 162.534.000,-
- i. Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi dengan alokasi anggaran Rp. 141.792.000,-
- j. Pengelolaan BMN dengan alokasi anggaran Rp. 31.022.000,-
- k. Layanan perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 24.159.757.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- b. Memilah undangan perjalanan dinas sesuai kepentingan.
- c. Belanja barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- d. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 24.561.093.358,- atau 96,3% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 25.514.219.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



INDIKATOR 13**Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P****1. Definisi Operasional**

Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu tahun. Target tahun 2018 yaitu 12 kali. Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya kapasitas SDM di KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

2. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu tahun
 Jumlah target peningkatan kapasitas bidang P2P

x 100 %

$$\frac{12 \text{ pelatihan}}{12 \text{ pelatihan}} \times 100 \% = 100 \%$$

- **Realisasi**

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu tahun yaitu:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Workshop penggunaan EKG	Februari 2018	30 orang
2.	Workshop penggunaan monitor tanda-tanda vital	Februari 2018	30 orang
3.	Workshop penggunaan USG	Februari 2018	30 orang
4.	Refreshing petugas TGC pengendalian penyakit menular	Maret 2018	63 orang
5.	Petemuan petugas untuk validasi pengetahuan imunisasi lanjutan	Maret 2018	30 orang
6.	Pelatihan pengendalian vektor terpadu	Juni 2018	2 orang
7.	Diklat regional pengendalian vektor	Juli 2018	5 orang
8.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Agustus 2018	1 orang
9.	Seminar/Kursus Pengendalian Vektor dan BPP	Agustus 2018	4 orang
10.	Peningkatan kapasitas SDM dalam teknik pengendalian vektor	November 2018	14 orang
11.	Peningkatan kapasitas SDM dalam teknik pengendalian Binatang Penular Penyakit	November 2018	14 orang
12.	Simulasi PKD	November 2018	26 orang

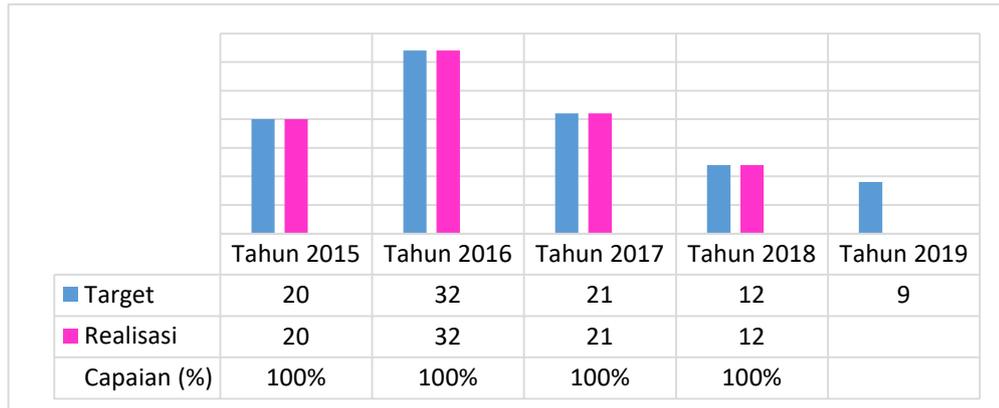
- **Capaian**

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{12 \text{ pelatihan}}{12 \text{ pelatihan}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

3. Capaian Kinerja

Grafik 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P



Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah peningkatan kapasitas SDM pada tahun 2018 sebanyak 12 kali dan sudah mencapai target sehingga capaiannya 100%. Capaian tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah sesuai dengan target dan sama setiap tahunnya. Namun realisasi pada tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2015, dan menurun pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini dikarenakan penurunan alokasi anggaran untuk peningkatan SDM bidang P2P.

Target indikator persentase layanan administrasi kepegawaian tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 100%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu terlaksana 12 kali kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, hal ini menyumbang pencapaian target RAP.



Capaian indikator indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM Bidang P2P KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 sama dengan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100%.

4. Analisis Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena tersedianya alokasi anggaran dan dukungan pimpinan hingga staff untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM bidang P2P

5. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan TOR dan RAB.
- b. Melakukan koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan.
- c. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor perihal pelaksanaan kegiatan yang melibatkan instansi lain.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM non teknis.

7. Pemecahan Masalah

Membuat usulan pelatihan bagi SDM non teknis dan agar Unit eselon I mengadakan pelatihan non teknis dan mengundang UPT serta menambah kuota peserta pelatihan.

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk Negara dengan anggaran Rp. 43.060.000,-
- b. Workshop penggunaan EKG dengan anggaran Rp. 4.020.000,-
- c. Workshop penggunaan monitor dan tanda-tanda vital dengan anggaran Rp. 4.020.000,-
- d. Workshop penggunaan USG dan tanda-tanda vital dengan anggaran Rp. 4.020.000,-



- e. Simulasi PKD dengan anggaran Rp. 16.280.000,-
- f. Seminar/kursus/diklat pengendalian vektor dan BPP dengan anggaran Rp. 26.192.000,-
- g. Peningkatan kapasitas SDM dalam teknik pengendalian vektor dan BPP dengan alokasi anggaran Rp. 16.172.000,-
- h. Pelatihan pengendalian vektor terpadu dengan alokasi anggaran Rp. 14.432.000,-
- i. Diklat regional pengendalian vektor dengan alokasi anggaran Rp. 232.974.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Pada tahun 2018 sebanyak 26 orang telah mengikuti kegiatan peningkatan kualitas SDM sehingga diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas.
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 364.910.596 atau 99,1% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 368.190.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.



INDIKATOR 14

Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana

1. Definisi Operasional

Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun. Target tahun 2018 yaitu 2 unit. Outcome dari indikator ini yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana di KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

2. Cara Perhitungan

$$\frac{\text{Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun}}{\text{Jumlah target pengadaan}} \times 100 \%$$

$$\frac{2 \text{ unit}}{2 \text{ unit}} \times 100 \% = 100 \%$$

• Realisasi

Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun yaitu:

- 1) Pengadaan pengembangan aplikasi pendaftaran pelaporan pelayanan kesehatan dan Vaksinasi Terintegrasi dengan Simkespel
- 2) Renovasi gedung kantor induk KKP Kelas I Soekarno-Hatta

• Capaian

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{2 \text{ unit}}{2 \text{ unit}} \times 100 \% = 100 \%$$

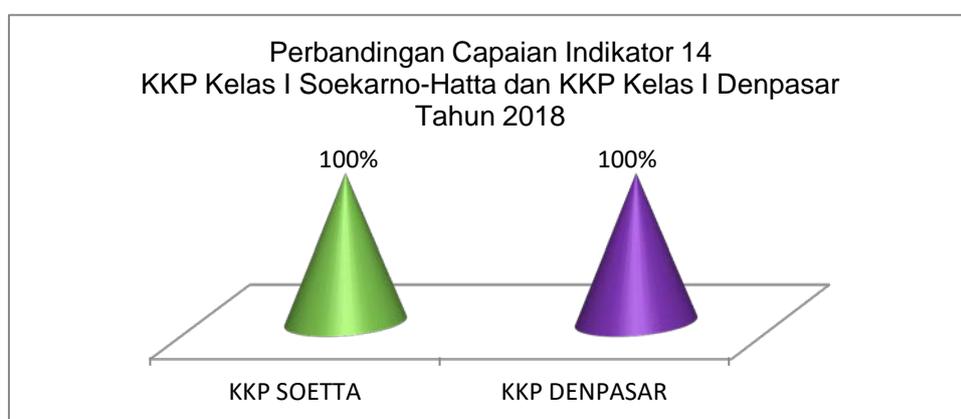
3. Capaian Kinerja

Grafik 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana



Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah pengadaan sarana prasarana pada tahun 2018 sebanyak 2 unit dan sudah mencapai target, sehingga capainnya 100%. Capaian tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah sesuai dengan target dan tetap setiap tahunnya. Namun realisasi pengadaan menurun setiap tahunnya berdasarkan rencana kebutuhan dan alokasi belanja modal yang diberikan.

Target indikator persentase satker pusat dan daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar tahun 2018 pada RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yaitu 64%. Realisasi kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 yaitu 2 paket pengadaan, hal ini menyumbang pencapaian target RAP.



Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator jumlah pengadaan sarana prasarana KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 sama dengan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target tahun 2018 dapat dicapai karena tersedianya alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana tersebut, terdapat SDM yang bertugas sebagai pejabat pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan, tim teknis, serta adanya dukungan dan monitoring dari pimpinan selama proses pengadaan hingga penerimaan barang/jasa.

5. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempublikasikannya di aplikasi SIRUP.
- b. Memilih penyedia barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku

- c. Menggunakan aplikasi teknologi dalam memilih penyedia barang/jasa yaitu aplikasi LPSE

6. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Masih terdapat hal-hal yang belum dipahami pada Aplikasi SPSE versi 4.3 yang terbilang masih baru.

7. Pemecahan Masalah

Pengenalan dan workshop Aplikasi SPSE terbaru untuk Pokja ULP

8. Analisis Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu:

- a. Pengadaan pengembangan aplikasi pendaftaran pelaporan pelayanan kesehatan dan Vaksinasi Terintegrasi dengan Simkespel dengan alokasi anggaran Rp. 35.000.0000
- b. Renovasi gedung kantor induk KKP Kelas I Soekarno-Hatta dengan alokasi anggaran Rp. 4.000.000.000,-

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Proses pengadaan dilaksanakan oleh SDM yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pengadaan Barang/Jasa.
- b. Realisasi penggunaan anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 3.478.735.000 atau 86,21% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.035.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Efisiensi belanja modal dengan harga terendah namun tetap dengan kualitas yang sama seperti pengadaan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Efisiensi Pengadaan Tahun 2018

No	Pengadaan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
1	Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Pelayanan Kesehatan dan Vaksinasi	35.000.000	34.985.000	0,05 %
2	Lelang Konstruksi Renovasi Gedung	3.785.710.000	3.443.750.000	13,9 %
Jumlah		4.035.000.000	3.478.735.000	13,8%

C. SUMBER DAYA

1. Anggaran Pengeluaran

Sumber anggaran pengeluaran KKP Kelas I Soekarno Hatta adalah DIPA Tahun 2018 dengan pagu sebesar Rp. 35.886.416.000,-.

Grafik 3.24
Realisasi Anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa setiap pagu anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun 2015 sampai tahun 2017 selalu bertambah, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 95,46%, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengeluaran Menurut Jenis Belanja
KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2018

No	Jenis Belanja	Alokasi	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	17.912.964.000	17.084.971.846	95.38
2	Belanja Barang	13.938.452.000	13.692.081.190	98.23
3	Belanja Modal	4.035.000.000	3.478.735.000	86.21
	Total	35.886.416.000	34.255.788.036	95.46

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni (RM)	24.970.201.000	24.043.190.817	96.29
2	PNBP	10.916.215.000	10.212.597.219	93.55
Total		35.886.416.000	34.255.788.036	95.46

Alokasi anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta berasal dari 2 sumber pembiayaan yaitu Rupiah Murni (RM) dan PNBP. Sumber RM sebesar Rp. 24.970.201.000,- atau 69,58% dari alokasi dengan realisasi anggaran sebesar 96.29% sedangkan yang berasal dari PNBP yaitu Rp. 10.916.215.000,- atau 30.4% dari alokasi dengan realisasi sebesar 93.55%.

Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018

KODE	KEGIATAN / OUTPUT	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	4.818.997.000	4.707.095.221	97,7%
2058.004	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB	286.157.000	192.957.000	67,4%
2058.007	Layanan Kekarantina Kesehatan	4.444.040.000	4.427.223.721	99,6%
2058.009	Cegah Tangkal Penyakit Dalam Pelaksanaan Asian Games dan Para Games	88.800.000	86.914.500	97,9%
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	1.374.000.000	1.347.619.457	98,1%
2059.005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	400.000.000	397.993.750	9,9%
2059.009	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	974.000.000	949.625.707	97,5%
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	179.200.000	172.230.000	96,1%
2060.500	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	99.200.000	92.230.000	93,0%
2060.502	Layanan Pengendalian Penyakit TB	80.000.000	80.000.000	100,0%
2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	29.514.219.000	28.028.843.358	95,0%
2063.053	Layanan internal (over head)	5.354.462.000	4.753.365.761	88,8%
2063.994	Layanan Perkantoran	24.159.757.000	23.275.477.597	96,3%
TOTAL		35.886.416.000	34.255.788.036	95,46%

Sebagian besar anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 dipergunakan untuk dukungan manajemen dan kegiatan surveilans dan karantina kesehatan. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 95,46% dengan capaian indikator kinerja sebesar 131,0%.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber anggaran penerimaan KKP Kelas I Soekarno-Hatta antara lain berasal dari: buku ICV, vaksinasi, penerbitan dokumen, pemeriksaan pasien, pelayanan ambulans dan penerbitan sertifikat. Pada tahun 2018, KKP Kelas I Soekarno-Hatta menargetkan penerimaan PNBP sebesar Rp. 27.290.500.000,-.

Tabel 3.11
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2018

No	Jenis PNBP	Tarif	Realisasi sd Tahun 2018	
			Volume	Jumlah
1	Penerimaan Sensor/Karantina			
	Pengawasan /Pemeriksaan			
	Buku ICV	25.000	139.210	3.480.250.000
	Vaksin yellow Fever	300.000	4.117	1.235.100.000
	Vaksin Meningitis	260.000	104.825	27.254.500.000
	Surat Keterangan Sehat	5.000	679	3.395.000
	Surat Keterangan Sehat untuk Terbang	5.000	13.210	66.050.000
	Surat Jenazah	10.000	2.993	29.930.000
	Pendaftaran	5.000	130.336	651.680.000
	Pemeriksaan Dokter	15.000	130.219	1.953.285.000
	Ambulance ke DKI (dlm kota)	50.000	236	11.800.000
	Ambulance luar DKI (Jakarta,Bekasi, Bogor)	100.000	236	23.600.000
	Sertifikat Knock Down	100.000	144	14.400.000
	Sertifikat OMKA	100.000	33	3.300.000
	Sertifikat Air Bersih	50.000	404	20.200.000
	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran	50.000	106	5.300.000
	Emergency	50.000	118	5.900.000
	Surat Sertifikat Sehat	10.000	259	2.590.000
	Sertifikat laik Hygiene Jasa Boga C	100.000	1	100.000
	Pemeriksaan Laboratorium :		0	-
	Darah Rutin	25.000	3	75.000
	Gula darah	18.000	15	270.000
	Test Kehamilan	25.000	2.448	61.200.000
	Asam Urat	18.000	4	72.000
	SGOT	18.000	1	18.000
	SGPT	18.000	1	18.000

	Cocain	18.000	26	468.000
	Amphetamine	18.000	26	468.000
	Methamphetamine	18.000	26	468.000
	Benzodiazepine	18.000	26	468.000
	Cannabinoid (THC)	18.000	26	468.000
	Cholesterol total	18.000	7	126.000
	Morphin	18.000	26	468.000
	Ureum	18.000	1	18.000
	Creatinin	18.000	1	18.000
	Urin Rutin	10.000	0	-
	HBsAg	25.000	0	-
	Widal	25.000	0	-
	Darah Lengkap	30.000	0	-
	Anti HBsAg	25.000	0	-
	Jumlah			34.826.003.000
	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin			8.788.000
	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan bangunan			38.011.000
	Jumlah			34.872.802.000

Realisasi penerimaan negara bukan pajak fungsional tahun 2018 sebesar Rp. 34.826.003.000,- ditambahkan dengan penerimaan negara bukan pajak umum sebesar Rp. 46.799.000,- sehingga penerimaan negara bukan pajak keseluruhan sebesar Rp34.872.802.000,- atau 127,8% dari target. Penerimaan PNPB terbesar berasal dari Vaksinasi Meningitis.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Nilai Barang Milik Negara di KKP Kelas I Soekarno-Hatta di akhir tahun 2018 sebesar Rp. 107.816.646.263,- namun terjadi penyusutan sebesar Rp. 49.533.909.353,- sehingga nilai netto menjadi Rp. 58.282.736.910,-. Barang Milik Negara yang mengalami penyusutan diantaranya peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, software, serta aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Tabel 3.12
Posisi Barang Milik Negara di KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2018

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	937.264.330
117113	Barang untuk pemeliharaan	150.000
117114	Suku cadang	108.097.441
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	0
117131	Bahan baku	230.110.500
117199	Persediaan lainnya	8.189.863.347
131111	Tanah	16.626.425.000
132111	Peralatan dan Mesin	65.848.748.983
133111	Gedung & bangunan	14.573.150.382
134113	Jaringan	11.490.260
135121	Aset tetap lainnya	502.616.620
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(48.567.966.943)
137211	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(247.214.730)
137313	Akumulasi penyusutan jaringan	(4.883.280)
162151	Software	197.702.000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	393.325.400
169122	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(393.325.400)
169315	Akumulasi amortisasi software	(122.817.000)
Jumlah		58.282.736.910

Tabel 3.13
Posisi Barang Persediaan di KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2018

Kode	Uraian	Nilai Persediaan
117111	Barang Konsumsi	937.264.330
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	150.000
117114	Suku Cadang	108.097.441
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	230.110.500
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0
117199	Persediaan lainnya	8.189.863.347
Jumlah		9.465.485.618

Posisi barang persediaan di KKP Kelas I Soekarno-Hatta hingga akhir tahun 2018 sebesar Rp. 9.465.485.618,- yang terdiri dari barang konsumsi sebesar Rp. 937.264.330,-, suku cadang sebesar Rp. 108.097.441,-, bahan baku yaitu sebesar Rp. 230.110.500,- dan persediaan lainnya sebesar Rp. 8.189.863.47,-

Tabel 3.14
Rincian Aset Sarana dan Prasarana
KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Luas Tanah	1.008 m ²
2	Luas Bangunan	3.573,5 m ²
3	Kendaraan roda 4	27 unit
4	Kendaraan roda 2	15 unit
5	Kendaraan khusus (Segway)	10 unit
6	Peralatan dan Mesin lainnya	1.198 unit

BAB IV KESIMPULAN

Kegiatan yang dilakukan KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya telah berupaya meningkatkan kinerja dalam cegah tangkal keluar masuknya penyakit menular berpotensi wabah baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma.

Secara keseluruhan kegiatan tersebut dapat terlaksana baik dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 132,8% dimana seluruh indikator kinerja telah mencapai target dan realisasi anggaran sebesar 95,46%. Dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat dipaparkan bahwa :

- a. Terdapat 7 indikator yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu:
 - 1) Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
 - 2) Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
 - 3) Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
 - 4) Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
 - 5) Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
 - 6) Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu
 - 7) Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP
- b. Terdapat 7 indikator yang capaiannya 100%, yaitu:
 - 1) Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
 - 2) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
 - 3) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
 - 4) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
 - 5) Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
 - 6) Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
 - 7) Jumlah pengadaan sarana prasarana



Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja di tahun 2018 yaitu tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, optimalisasi sumber daya manusia yang ada, peningkatan kerjasama tim dan koordinasi dengan lintas sektor.

Kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja selama tahun 2018 yaitu jumlah SDM yang belum sebanding dengan beban kerja jumlah orang, alat angkut, barang, dan tempat yang harus dilakukan pengawasan, alokasi anggaran pada beberapa kegiatan dengan cakupan yang banyak belum memadai, kontribusi lintas sektor / lintas program yang berhubungan dengan kegiatan KKP Kelas I Soekarno-Hatta masih ada yang belum baik.

Pemecahan masalah pada tahun yang akan datang adalah usulan penambahan SDM terampil di bidangnya, pengalokasian anggaran berdasarkan Petunjuk Perencanaan dan skala prioritas, monitoring dan evaluasi pencapaian kegiatan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik melalui advokasi, sosialisasi kegiatan dan membangun komitmen secara bersama-sama untuk mencegah keluar masuknya penyakit melalui pintu gerbang Negara.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Anas Ma'ruf, MKM

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. Mohamad Subuh, MPPM

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belitung, 19 Desember 2017

Pihak Kedua

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP. 196201191989021001

Pihak Pertama,

dr. Anas Ma'ruf, MKM
NIP. 197005202002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA
TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP 3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit 4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus 5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 6. Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	600 sertifikat 100% 38.692 dokumen 8 posko 1 bandara 100.000 sertifikat 2 bandara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.000 orang
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	10. Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu 11. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	1 lokasi 5 lokasi
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 13. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 14. Jumlah pengadaan sarana prasarana	40 dokumen 12 kali 2 unit

No Kegiatan	Anggaran
1. Surveilans dan Karantina Kesehatan	Rp 4.818.997.000,-
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Rp 1.374.000.000,-
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Rp 179.200.000,-
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	-
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 29.514.219.000,-
Total	Rp 35.886.416.000,-

Belitung, 19 Desember 2017

Direktur Jenderal P2P

Kepala KKP Kelas I Soekarno-Hatta



dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP 196201191989021001



dr. Anas Ma'ruf, MKM
NIP. 197005202002121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Anas Ma'ruf, MKM

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M.Kes

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

dr. Anung Sugihantono, M.Kes
NIP 196003201985021002

dr. Anas Ma'ruf, MKM
NIP 197005202002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA
TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	600 sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	38.692 sertifikat
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	8 layanan
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 bandara
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	100.000 sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	2 bandara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.000 orang
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	10. Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu	1 lokasi
		11. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	5 lokasi
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen
		13. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	12 pelatihan
		14. Jumlah pengadaan sarana prasarana	2 unit

No Kegiatan	Anggaran
1. Surveilans dan Karantina Kesehatan	Rp 4.818.997.000,-
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Rp 1.374.000.000,-
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Rp 179.200.000,-
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	-
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 29.514.219.000,-
Total	Rp 35.886.416.000,-

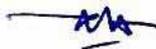
Jakarta, Maret 2018

Direktur Jenderal P2P

Kepala KKP Kelas I Soekarno-Hatta



dr. Anung Sugihantono, M.Kes
NIP 196003201985021002



dr. Anas Ma'ruf, MKM
NIP. 197005202002121003